



VOLUME XII / NO. 115 / APRIL 2017

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

RESEP ATASI KETIMPANGAN EKONOMI

Dalam dua tahun terakhir, indeks koefisien Gini sebagai indikator tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh telah mengalami penurunan. Realisasi pertumbuhan ekonomi pun tak mengecewakan. Kini, pemerintah berupaya keras mewujudkan pemerataan penghasilan dan redistribusi kekayaan untuk ekonomi yang lebih berkeadilan.



Daftar Isi



Foto Cover
Anas Nur Huda

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA

- 13** Berbagai Jalan Mengurangi Ketimpangan
- 16** Infografis
- 18** Meramu Resep Tepat Pemeratakan Kemakmuran Rakyat
- 21** Mengobati Ketimpangan Jangka Panjang
- 23** Pajak Solusinya

REPORTASE

- 25** Amnesti Pajak Tahap Akhir Kembali Diingatkan
- 26** Menkeu Hadiri Pertemuan G20 di Jerman

WAWANCARA

- 27** Membangun Rezim Anti Pencucian Uang

POTRET KANTOR

- 30** Mengawal Integritas Kemenkeu

FIGUR

- 32** Kepemimpinan Yang Rakyat

EKONOMI TERKINI

- 36** Trump, Proteksionisme, dan Harapan pada Asia

KOLOM EKONOM

- 40** Pajak Progresif Tanah yang Tidak Produktif

GENERASI EMAS

- 44** Temuan Signifikan untuk Pemberantasan Tuberkulosis

OPINI

- 46** Sinergi Pusat dan Daerah: Pinjaman Tanpa Bunga Untuk Infrastruktur

REGULASI

- 48** Ditjen Pajak Bisa Akses Langsung Rekening Nasabah Perbankan

INSPIRASI

- 50** Dedikasi Melalui Aplikasi

RENUNGAN

- 52** Melatih Hati

FILM

- 53** Beauty and the Beast: Menghidupkan Kembali Kisah tentang Cinta Sejati

JALAN-JALAN

- 54** Pura Taman Ayun, Sebuah Warisan Budaya Dunia

SELEBRITI

- 56** Menyatukan Alunan Musik dan Aliran Ilmu



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.



Tidak Ikut amnesti pajak

ungkap . tebus . lega



Paling lama
3 Tahun

Terhitung sejak
Amnesti Pajak
mulai berlaku.

DJP
Mendapat
Data



Harta Wajib Pajak

yang diperoleh antara
**1 Januari 1985 s.d.
31 Desember 2015**

dan harta tersebut
Belum Dilaporkan dalam
SPT Pajak Penghasilan

dianggap
sebagai



**tambahan
penghasilan**

yang diperoleh Wajib Pajak
pada saat ditemukannya data
mengenai Harta tersebut.

&
kena

Pajak Penghasilan
dengan tarif normal



“

**Segera manfaatkan
Amnesti Pajak dengan tarif murah
3% (s.d. 31 Desember 2016) atau
5% (1 Januari - 31 Maret 2017).**

25%

WP
Badan

**5% s.d.
30%**

Orang
Pribadi

+

2%

sanksi
bunga

Dasar Hukum :
Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4)
UU No.11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak

Info lebih lanjut :

www.pajak.go.id/amnestipajak



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Dari Lapangan Banteng

Mempersempit Ketimpangan Ekonomi Indonesia

Tidak perlu pergi ke pedalaman atau pelosok desa untuk melihat ketimpangan antara golongan kaya dan miskin di Indonesia. Apabila kita tiba di Jakarta melalui bandara Soekarno-Hatta dan melewati jalan tol Jakarta Outer Ring Road, maka terlihat sangat jelas ketimpangan tersebut. Di balik gemerlap gedung-gedung megah, masih banyak terdapat bangunan kumuh dan tidak terawat yang sangat kontras.

Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini termasuk yang tertinggi dunia tidak mampu mencegah terjadinya kemiskinan? Dari berbagai studi dan riset, memang terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, tapi tidak untuk ketimpangan pendapatan. Ketimpangan terjadi karena pertumbuhan ekonomi cenderung hanya

menjadikan sekelompok orang atau institusi yang tumbuh besar, sementara sebagian besar lainnya tidak dapat menikmatinya. Hal ini dapat disebabkan banyak hal, antara lain, tidak efektifnya program pengentasan kemiskinan, tidak meratanya pembangunan infrastruktur, dan juga masih adanya praktek korupsi dalam proyek pembangunan.

Poverty gap Indonesia yang diukur dari koefisien Gini, saat ini berada di angka 0,394 (data September 2016). Angka ini menurun banyak dalam lima tahun terakhir. Sebelumnya berada di angka 0,41. Namun demikian, pengukurannya juga masih menjadi perdebatan. BPS sebagai lembaga resmi yang mengeluarkan hasil perhitungannya menggunakan base data pengeluaran, bukan dari pendapatan yang diterima. Bisa jadi koefisien tersebut menurun karena pengeluaran dari orang-orang golongan kaya menurun

tajam dalam dua tahun terakhir karena berkurangnya pendapatan. Dengan begitu, apabila menggunakan angka pendapatan rumah tangga, maka angka koefisien Gini akan menjadi lebih besar.

Pemerintah sebenarnya telah mempunyai banyak program untuk mengurangi kesenjangan ini. Bentuknya antara lain bantuan tunai maupun non tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi finansial, dana bantuan desa, termasuk pembangunan infrastruktur untuk membangun konektivitas yang mempermudah arus distribusi hasil produksi. Apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini telah berjalan dengan baik. Kementerian Keuangan pun akan lebih meningkatkan kualitasnya dalam hal efektivitas, sehingga penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Pemerintah fokus meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin, salah satunya memacu pertumbuhan ekonomi inklusif dengan kebijakan berikut. Pertama, pemerintah membuat kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa u/ memperkuat pembangunan daerah & desa. Kedua, kebijakan penyaluran subsidi dan bantuan sosial nontunai yang lebih tepat sasaran. Ketiga, kebijakan peningkatan pembangunan infrastruktur & konektivitas antarwilayah. Menurut #temankeu, upaya apa yang paling efektif untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia?

angga kurniawan @kurniawanakak menurut saya yg paling efektif adl "peningkatan pembangunan infrastruktur & konektivitas antarwilayah. Krn jika infrastruktur antarwilayah ditingkatkan, terutama jalur transportasi maka ekonomi (usaha bisnis) masyarakat sekitar bisa lebih berkembang dengan ekspansi ke daerah lain,

keluar masuk barang jadi bisa lebih sering dan lebih murah.

Navo Mudiarcana @navo_hm

ketimpangan di bidang apa? Kalau pendidikan bisa dengan membangun fasilitas pendidikan dan perbaikan sarana dan prasarana. Apabila kemiskinan bisa

dengan penyediaan lapangan pekerjaan serta pemberdayaan masyarakat (SDM) melalui pelatihan2.

Agus Arya Alit @arya_alit Memberikan modal usaha dan hak akses pendidikan tinggi bagi golongan masyarakat miskin.



tweet



www.kemenkeu.go.id



Kementerian Keuangan RI



@KemenkeuRI



Kemenkeu RI



kemenkeuri



majalahmediakeuangan

Musisi Pegawai Negeri

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui The Kolintang Percussion "BCMC" turut ambil bagian dalam perhelatan Jakarta International Java Jazz Festival 2017, Jumat (3/3). Dengan membawakan lagu Feeling Good dari Michael Buble, kelompok musisi pegawai negeri itu unjuk gigi di hadapan penikmat musik tanah air. Pada penyelenggaraannya yang ke-13, tak kurang dari 170 pemusik solo dan grup menghibur para penonton yang hadir di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

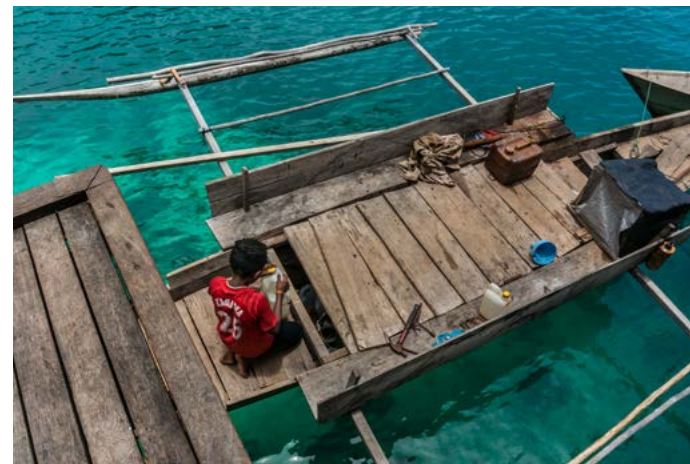
Foto
Api Kartiko



Pianemo yang Cantik

Gugusan pulau karang Pianemo di kawasan Raja Ampat, Papua Barat menyuguhkan pemandangan yang sangat cantik. Pianemo biasa disebut sebagai 'Wayag kecil' karena sama-sama memiliki keindahan alam seperti gugusan karang Wayag, tetapi dengan dimensi yang lebih mini. Pendakian untuk mencapai puncak pulau memerlukan waktu sekitar 15 menit. Lelah mendaki langsung terbayar dengan panorama menakjubkan setitik surga yang jatuh ke bumi.

Foto
Jauhar Rafid





24/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Duta Transformasi Kemenkeu Harus Akrab dengan Perubahan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan arahan pada acara Workshop Duta Transformasi Tahun 2017 bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (24/02). Acara yang diselenggarakan oleh Chief Transformation Office (CTO) Kemenkeu ini sudah menginjak tahun ketiga. Workshop ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para duta transformasi sebelum menjalankan tugas sebagai *Agent of Change* Kemenkeu. Menkeu dalam sambutannya mengatakan sebagai duta yang mewakili Kementerian Keuangan, para duta harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di segala aspek.



07/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Corporate University dan Sinergi Pengelolaan SDM

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto hadir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dengan tema “Akselerasi Implementasi Kementerian Keuangan *Corporate University*” di aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandung pada Selasa (07/03). Pada kesempatan tersebut, Sesjen memberikan arahan mengenai pentingnya koordinasi pelaksanaan fungsi Strategis Human Capital Management (SHCM) di Sekretariat Jenderal dan *corporate university* di BPPK sebagai mitra strategis organisasi di Kementerian Keuangan.

28/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Peran Anggaran Untuk Tekan Kesenjangan

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas anggaran agar dapat tercipta keadilan dan kemakmuran di masyarakat. Peran pelaksanaan anggaran menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai berkualitas dan lebih inklusif, sehingga kesenjangan dalam masyarakat dapat terus ditekan. “Kesenjangan antar wilayah juga perlu untuk terus diperkecil sehingga yang disebut kemakmuran itu tidak hanya dinikmati di Jakarta atau di Jawa tapi oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (28/02).



07/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Jadi Dosen Tamu di Universitas Harvard

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi dosen tamu dalam Albert H. Gordon Lecture: The New World Order, Call for a Coordinated Global Response di Harvard Kennedy School, Universitas Harvard Amerika Serikat pada Rabu (07/03) waktu setempat. Dalam paparannya, Menkeu mengatakan bahwa pemerintah Indonesia serius untuk menjaga ekonomi, di tengah kondisi pertumbuhan global yang lemah, harga komoditas yang menurun serta ketimpangan ekonomi yang meningkat. Menurut Menkeu, Indonesia merespons kondisi global dengan penerapan manajemen ekonomi yang bertanggung jawab dan kebijakan untuk menjaga fundamental yang kuat. “Saya dan teman-teman di pemerintahan telah berupaya keras untuk mendorong kebijakan ekonomi agar dapat menyebarkan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” katanya.



13/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Pansel Sudah Ajukan 21 Nama Calon DK OJK ke Presiden

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, selaku ketua panitia seleksi (pansel) calon Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), bersama anggota pansel lainnya mengumumkan 21 nama calon DK OJK yang telah lolos seleksi tahap IV. “Dua puluh satu nama telah kami sampaikan kepada Presiden pagi tadi,” kata Menkeu pada Konferensi Pers Pansel DK OJK di Mezzanine, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta pada Senin (13/03). Dari 21 nama tersebut, mereka berasal dari Bank Indonesia (5 orang), OJK (5 orang), industri (5 orang), Kementerian Keuangan (3 orang), akademisi (2 orang) dan pemerintah non Kemenkeu (1 orang). “Presiden nanti akan memilih 14 nama untuk selanjutnya disampaikan ke DPR untuk *fit and proper test*,” lanjut Menkeu.

Agenda

- 1/04 Seminar Perpajakan dengan tema “ Peran Strategis Perpajakan Dalam Perekonomian”
- 1/04 Pekan Raya Perpajakan Nasional 2017 di PKN STAN Bintaro
- 1/04 Seminar Nasional Perpajakan
- 9-14/03 Roadshow Samurai Bond di Jepang
- 23/04 Ujian PMB PKN STAN Tahap I (TPA dan Tes Bahasa Inggris) Meeting dengan Investor Deutsche Bank di Jakarta.
- 23/04 Agence Francaise Developpment di Hotel Borobudur, Jakarta
- 27-28/04 High Level Policy Dialogue di Jakarta



13/02

Teks
Biro KLI

Foto
DJBC

Akasia-Akrab, Sinergi DJP dan OJK di Sektor Jasa Keuangan dan Perpajakan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan pada acara *launching* aplikasi Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia) bagi internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab) untuk internal OJK. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar'ie Muhammad, Kantor Pusat DJP pada Senin (13/03). Nota Kesepahaman antara DJP dan OJK mengatur tentang kerja sama dalam bidang pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan perpajakan.



14/03

Teks
Biro KLI

Foto
DJPPR

Kemenkeu Jadi Pilot Project E-LHKPN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi institusi *pilot project* yang menerapkan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik (e-LHKPN). Saat sosialisasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menagih integritas para pejabat Kemenkeu sebagai bagian dari instansi penjaga keuangan negara. “Para pejabat Kemenkeu haruslah mencerminkan nilai-nilai teladan seperti transparan, akuntabel, profesional, jujur, dan amanah,” tegas Menkeu pada acara yang berlangsung di Aula Mezzanine, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/03).

14/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Stakeholders Gathering Kementerian keuangan 2017

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan *Stakeholders Gathering* 2017 dengan tema “Peran Strategis APBN dalam Menghadapi Permasalahan Bangsa”. Acara ini berlangsung di Aula Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (14/03). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasinya kepada *stakeholders* yang senantiasa memberikan masukan serta dukungannya atas setiap kebijakan Kemenkeu. “Kementerian Keuangan memiliki banyak sekali *stakeholders* atau pemangku kepentingan, dan pertemuan ini tujuannya adalah untuk mengenalkan lebih banyak dan juga tentu memelihara silaturahmi dan hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan, yang tentu banyak sekali berhubungan dengan fungsi dan tanggung jawab dari Kementerian Keuangan,” ungkap Menkeu.



Pemerintah berkomitmen untuk terus melaksanakan agenda pembangunan tanpa dibayangi permasalahan ketimpangan.

Foto
Anas Nur Huda

Berbagai Jalan Mengurangi Ketimpangan

Presiden Jokowi memberikan perhatian serius pada upaya pemerintah mengatasi ketimpangan ekonomi. Pada Selasa (14/3) lalu misalnya, Presiden menggelar pertemuan dengan pimpinan lembaga negara seperti DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial. “Siang hari ini kita berbicara masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi, yang berkaitan dengan kesenjangan sosial ekonomi yang ada,” kata Presiden dalam keterangan pers sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id. Menurut Presiden, pemerintah akan melakukan redistribusi aset dan reforma agraria yang

diharapkan dapat mengurangi kesenjangan di masyarakat. Caranya dengan mendistribusikan tanah kepada kelompok masyarakat adat dan pondok pesantren serta mempercepat sertifikasi tanah. Dengan mengantongi sertifikat tanah, masyarakat memiliki aset sah. “Sehingga, nantinya rakyat bisa memiliki kolateral, memiliki agunan, dalam rangka bisa mengakses permodalan ke perbankan,” ujar Presiden lebih lanjut. Dalam kesempatan berbeda, persoalan ketimpangan ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menurut Menkeu, tingkat kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami penurunan, tetapi

kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin melebar. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan agenda pembangunan tanpa dibayangi permasalahan ketimpangan. “Pemerintah ingin mencapai kesetaraan dan kesejahteraan dengan komitmen untuk menjaga keberagaman, kedamaian, stabilitas, dan inklusifitas,” kata Menkeu saat memberikan kuliah umum di Harvard Kennedy School, Harvard University, Amerika Serikat pada Selasa (7/3).

Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan bahwa pendapatan perkapita global telah mengalami kenaikan signifikan sebesar 460 persen pada jangka waktu antara 1950–2015. Sementara itu, persentase penduduk miskin di dunia juga telah turun dari 72 persen pada 1950 menjadi sepuluh persen pada 2015. Sayangnya, di samping ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin melebar, akses terhadap pekerjaan dan jaring pengaman sosial juga mengalami kondisi serupa.

Di dalam negeri, tingkat kemiskinan telah mengalami penurunan sejak tahun 2000. Pada rentang 2008 hingga 2012, indeks koefisien Gini Indonesia sempat dalam situasi stagnan pada angka 0,41. Pada September 2016, angkanya menurun menjadi 0,394. Namun, yang perlu dicermati kemudian adalah naiknya ketimpangan pendapatan dan kesempatan. “Pertumbuhan ekonomi yang cepat bisa dilihat ketika orang berkunjung ke Jakarta, sementara *progress* yang sama tidak terlihat ketika berkunjung

ke daerah-daerah pinggiran,” ujar Menkeu dalam presentasi berjudul “The New World Order: Indonesia’s Response and Call for a Coordinated Global Response” itu.

Sebagai contoh, Menkeu melanjutkan, anak-anak yang dilahirkan di Jakarta lebih memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang SMA dibandingkan mereka yang dilahirkan di Papua dan Maluku karena akses terhadap pendidikan lebih terbatas. Begitu juga dengan akses terhadap sanitasi yang baik. “Anak-anak di pedalaman, persentase mereka untuk hidup dengan sanitasi yang tidak baik mencapai 98 persen,” katanya. Kesenjangan yang menjadi problem bukan hanya menyangkut sanitasi, melainkan juga indikator kesempatan lainnya seperti perumahan, kualitas layanan kesehatan, dan juga pendidikan. Menurut Menkeu, ketidakmerataan kesejahteraan adalah permasalahan moral yang sangat kontras dengan tujuan kehidupan sebagai bangsa.

Pemerintah menyadari bahwa anggaran APBN tidak cukup untuk mendukung pencapaian tujuan kemiskinan dan ketimpangan. Solusinya, pemerintah berinvestasi lebih di bidang infrastruktur, kesehatan, dan jaminan sosial. Salah satu contoh yang disampaikan Menkeu adalah realokasi anggaran untuk sekolah kejuruan dan yang utama memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada seluruh masyarakat. “Pemerintah ingin berinvestasi lebih pada manusia dan kualitas kehidupan mereka,” ujar Menkeu.

Faktor penyebab

Ketika menghadiri acara Peluncuran Laporan “Ketimpangan: Menuju Indonesia yang Lebih Setara” oleh lembaga swadaya Oxfarm dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Menkeu menyebutkan ketidakseimbangan kesempatan sebagai salah satu penyebab kesenjangan. “*Inequality of opportunities* menyebabkan kemiskinan akan selalu diwariskan ke generasi berikutnya jika tidak ditangani sejak dini,” ujar Menkeu pada kegiatan itu di Jakarta, Kamis (23/02). Di beberapa daerah, kesenjangan kesempatan terjadi sejak anak masih di dalam kandungan. “Karena orang miskin tidak bisa sekolah, dari bayi bahkan janin dia tidak mendapatkan gizi yang cukup, (sehingga) walaupun mendapat sekolah gratis, dia tidak bisa berpartisipasi di sekolah karena *brain-nya* tidak di-*developed* semenjak di dalam kandungan,” lanjut Menkeu.

Di samping kesempatan yang tidak sama, terdapat beberapa faktor lain yang turut menyebabkan ketimpangan di Indonesia. Menurut Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, Rofiyanto Kurniawan, ketidakimbangan kesempatan mendapatkan pekerjaan (*unequal jobs*), kerentanan terhadap guncangan ekonomi (*low resilience to shocks*), dan kekayaan yang dinikmati segelintir orang saja (*high wealth concentration*) turut menyebabkan ketimpangan. Faktor *unequal jobs* dapat dilihat pada kondisi masih banyaknya lapangan pekerjaan pada sektor yang memiliki produktivitas rendah. Sementara itu, terkait *low resilience to shocks*, Rofiyanto menyebutkan hal ini tercermin dari jumlah 40 persen masyarakat termiskin yang masih rentan terjerembab dalam kemiskinan yang lebih dalam, termasuk akibat volatilitas harga pangan atau bencana alam.

Resep mengatasi ketimpangan

Dalam sambutannya di acara Oxfarm dan INFID, Menkeu menjelaskan bahwa pajak menjadi salah satu instrumen yang memiliki peran penting untuk mengatasi ketimpangan dan ketidaksetaraan di Indonesia. Menurutnya, kemampuan aparaturnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengumpulkan pajak menjadi tidak mudah ketika penyembunyian aset dan pendapatan masih dijumpai di lapangan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan harus dilakukan,

termasuk dengan memperbaiki peraturan-peraturan perpajakan. Hal ini bertujuan agar DJP memiliki akses tanpa terhalangi, sekaligus juga memberikan akses kepada petugas pajak negara lain, untuk menelusuri penyembunyian aset dan pendapatan yang terjadi di Indonesia.

Senada dengan Menkeu, Rofiyanto menambahkan bahwa pajak juga merupakan alat redistribusi pendapatan antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan fiskal. Sekitar 80 persen penerimaan pajak bersumber dari pulau Jawa yang sebagian dibagihasilkan dan dialokasikan ke wilayah lain, termasuk diberikan dalam bentuk transfer. Oleh karena itu, implementasi kebijakan transfer daerah, termasuk dana desa, yang kini nilainya lebih tinggi dibandingkan belanja pemerintah pusat diharapkan dapat mengurangi disparitas kesejahteraan antarwilayah.

Lebih jauh, Rofiyanto juga mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan beberapa kebijakan lain untuk mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan akses infrastruktur dasar (pendidikan, kesehatan, konektivitas), meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial, meningkatkan akses ke permodalan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan berupaya meningkatkan akses ke pekerjaan berkualitas.

Metode lain

Dari sudut pandang pengamat, Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Lembaga

Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, mengatakan bahwa ketimpangan layaknya api dalam sekam. “Tidak terlihat secara kasat mata, tetapi tanpa solusi nyata, api ini akan dapat meluluhlantakkan bangunan Indonesia,” kata Teguh yang ditemui Media Keuangan di Jakarta, Selasa (7/3).

Berbagai studi menunjukkan ketimpangan merupakan katalis dari kecemburuan sosial masyarakat, konflik sosial, dan kegaduhan politik. Teguh mengatakan bahwa jika dibiarkan, ketimpangan distribusi kesejahteraan dapat mempengaruhi kewibawaan pemerintah. “Ketimpangan akan menimbulkan resistensi masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Dalam kondisi perekonomian saat ini, pemerintah perlu berfokus pada apa yang disebut dengan kemiskinan relatif. Kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai kekurangan sandang, pangan, dan papan, tetapi kemiskinan bersifat relatif terhadap kepemilikan orang lain. Menurut Teguh, perubahan persepsi kemiskinan dan peningkatan ketimpangan menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan kegaduhan di media sosial serta perilaku intoleransi yang dapat mengancam rajutan kebangsaan. Faktor-faktor lainnya adalah rendahnya literasi membaca dan meningkatnya angka pengangguran usia muda.

Teguh berpandangan bahwa pemerintah dapat mengurangi kesenjangan dengan jalan meredistribusi pendapatan,

mendorong perkembangan kelas menengah (kelompok 40–80 persen) yang sangat sensitif mendorong perubahan indeks koefisien Gini, serta mempercepat pertumbuhan masyarakat kelas bawah untuk menciptakan pertumbuhan inklusif. Teguh mendukung upaya pemerintah mengejar pembangunan infrastruktur dengan catatan perlunya berfokus pada usaha agar *national project* bisa sinkron dengan *local project*. “Hal ini karena proyek nasional cenderung untuk mendorong pertumbuhan, sedangkan yang dapat mengurangi ketimpangan adalah proyek lokal yang nyata, seperti membangun sanitasi dan irigasi,” kata Teguh.

Dalam tataran yang lebih teknis, lima kebijakan utama untuk menurunkan ketimpangan dapat dicapai dengan beberapa jalan. *Pertama*, pemerintah berupaya meningkatkan *tax ratio* dan kepatuhan pembayaran pajak. Rasio perpajakan di Indonesia termasuk yang paling rendah di kawasan ASEAN, sehingga pemerintah tidak banyak memiliki ruang fiskal untuk membiayai pembangunan. Jalan kedua dapat dicapai dengan mendorong *personal social responsibility*. “Kelompok kaya didorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan filantropi, sehingga dapat turut langsung membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat,” ujar Teguh. Berikutnya, pemerintah berupaya menjaga keterpaduan antara pengembangan sumber daya manusia dan peta jalan transformasi perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan keterampilan untuk para pekerja di sektor jasa.

Pemerintah juga dipandang perlu secara serius melakukan pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintah. Yang tak kalah penting bagi pemerintah adalah melakukan upaya perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan kesehatan, pangan, pendidikan, dan perumahan agar mereka bisa bekerja dan berusaha lebih baik.

Sebagai penutup, pemerintah dipandang perlu untuk menggunakan pendekatan lain untuk memastikan pengukuran tentang ketimpangan, selain pengukuran pendapatan yang selama ini dijadikan ukuran dalam menghitung indeks koefisien Gini. “Misalnya dengan membandingkannya dengan melakukan pengukuran kemiskinan relatif,” ujar Teguh. Metode yang dapat dilakukan adalah pengukuran aset dan kepemilikan tanah.

Teks Dwinanda Ardhi



Ketimpangan ekonomi masih perlu menjadi perhatian pemerintah.

1%
penduduk Indonesia

menguasai

49,3%
kekayaan nasional
(berdasarkan survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse)

Demikian pula dengan perhitungan statistik BPS di mana ketimpangan ekonomi di Indonesia masih tinggi berdasarkan angka perhitungan Index Coefficient Gini.

Akibat tingginya ketimpangan ekonomi di Indonesia, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu melakukan beberapa langkah strategis ataupun terobosan untuk menuntaskan permasalahan ini.

Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Indonesia

Beberapa langkah pemerintah mengurangi ketimpangan ekonomi:

Sumber: Kementerian Sosial



Reformasi program bantuan sosial



Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk beberapa program



Memberdayakan usaha masyarakat



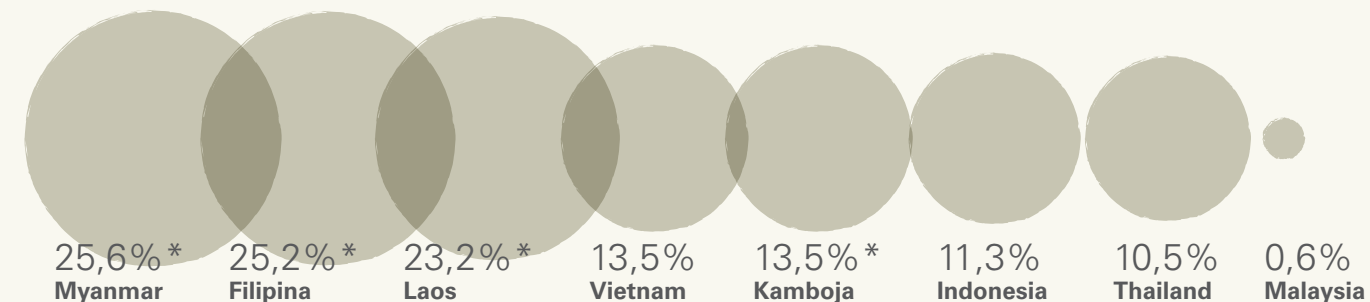
Meningkatkan dan mengubah pola investasi



(seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Desa Sejahtera Mandiri (DSM), dan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu))

Tingkat Kemiskinan di Beberapa Negara ASEAN Tahun 2014

Sumber: World Bank Data and Asian Development Bank (ADB)*



Tingkat kemiskinan di Indonesia masih **sedikit lebih baik** dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

Indeks Koefisien Gini Indonesia Tahun 2011—2016

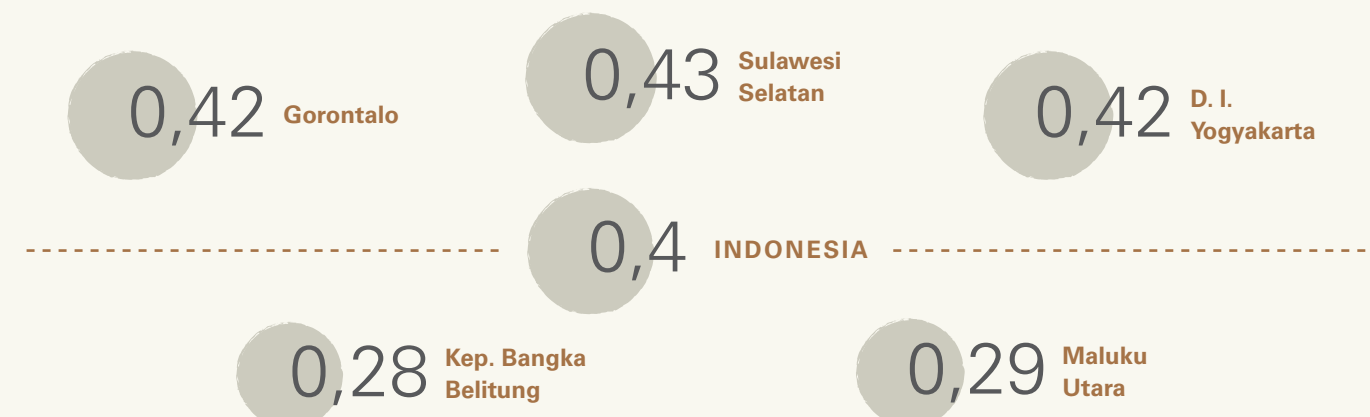
Sumber: Data Statistik, BPS



Tingkat kemiskinan di tahun 2016 sedikit menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Indeks Koefisien Gini Beberapa Provinsi di Indonesia Tahun 2016

Sumber: Data Statistik, BPS



Meramu Resep Tepat Pemerataan Kemakmuran Rakyat



Foto
Anas Nur
Huda

Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia menurun. Selain itu, pada saat yang sama angka pengangguran di Indonesia juga mengalami penurunan. Di sisi lain, indikator ketimpangan ekonomi di Indonesia menunjukkan adanya kenaikan kesenjangan di masyarakat. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu memberi kue ekonomi yang merata kepada seluruh masyarakat.

“Kesenjangan itu kalau saya sebut sebagai *gini ratio*, tidak berarti bahwa yang miskin semakin miskin dan yang kaya makin kaya. Semua makin kaya, namun kecepatan dari akumulasi kekayaan bagi kelompok yang miskin dibandingkan dengan kelompok yang kaya atau daerah yang miskin dengan daerah yang kaya, itu jauh lebih cepat daerah yang kaya atau kelompok yang kaya. Dan (hal) ini menyebabkan yang disebut dengan kesenjangan,” jelas Menkeu dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2017 di Aula Danapala, Jakarta pada Kamis, 2 Maret 2017 lalu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa diperlukan instrumen dan desain pembangunan yang baik dan tepat agar kesenjangan itu tidak semakin melebar. Harapannya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mampu menurunkan kemiskinan, namun juga bisa mengatasi ketimpangan ekonomi.

Dana desa atasi ketimpangan daerah

Dana desa mengalami kenaikan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat dalam APBN tahun 2017, peningkatan alokasi Dana Desa naik menjadi Rp60 triliun dari Rp47 triliun pada tahun sebelumnya. Dana ini dialokasikan dengan tujuan untuk membangun pemerataan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Menkeu, selama ini kemiskinan di Indonesia terkonsentrasi terutama di daerah pedesaan. Diharapkan dengan adanya Dana Desa sebagai sumber daya baru bagi setiap desa, maka dalam beberapa tahun ke depan angka kemiskinan di desa dapat menurun. Menkeu juga menegaskan bahwa perlu adanya peningkatan dalam berbagai bidang di daerah dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan.

Menurut Menkeu dibutuhkan komitmen kepemimpinan yang kuat dari para pemimpin daerah untuk menjalankan program mereka dalam

mencapai tujuan bernegara, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi serta mendukung penuh berbagai macam program-program di daerah yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kemakmuran rakyat. Selain itu, Menkeu juga meminta kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk melakukan program *mentoring*. Dengan program ini, daerah-daerah yang sudah baik dapat membagi informasi dan pengalamannya untuk diterapkan di daerah-daerah lain.

Peran fiskal dalam redistribusi kekayaan

APBN sebagai instrumen fiskal memiliki peran besar dalam meredistribusikan pendapatan di masyarakat. Tujuannya tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga menurunkan ketimpangan di masyarakat. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PK APBN) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, menjelaskan dalam konteks pajak sebagai instrumen untuk redistribusi pendapatan, kebijakan perpajakan secara langsung mempunyai pengaruh pola redistribusi pendapatan atau dengan kata lain *collect more from rich and less from poor*. Pajak juga dapat menjadi alat redistribusi pendapatan antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan fiskal. Menurut Rofy, sekitar 80 persen penerimaan pajak bersumber dari pulau Jawa yang sebagian dibagikan ke wilayah lain, termasuk diberikan dalam bentuk transfer ke daerah.

Terkait reformasi perpajakan dan peran penting daerah dalam

mengatasi ketimpangan, Menkeu menegaskan akan menugaskan seluruh tim reformasi pajak untuk melaksanakan reformasi perpajakan, terutama dalam hal menghitung dan mengoleksi basis pajak di daerah yang selama ini masih banyak yang belum terdata. Lebih lanjut, menurut Menkeu diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan mampu membawa dampak ekonomi sosial yang lebih baik kepada masyarakat.

Menkeu juga menegaskan akan terus mendukung daerah untuk mampu memperbaiki ekonomi daerahnya mulai dari penetapan kebijakan daerahnya sampai dengan proses implementasi atau kualitas dari birokrasinya. Misalnya melalui penyederhanaan perizinan, kemampuan untuk memperbaiki pelayanan publik, dan peningkatan investasi infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan masyarakat.

Belajar dari Brazil

Brazil dipilih oleh Bank Dunia sebagai salah satu negara yang berhasil memberikan perlindungan sosial kepada rakyatnya melalui program *conditional cash transfers* (CCT) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersyarat. Menurut data Bank Dunia, Brazil meluncurkan program BLT bersyarat yang mereka beri nama *Bolsa Familia* pada tahun 2003. Program tersebut telah mampu menjadikan Brazil sebagai salah satu negara terbesar yang membelanjakan anggarannya dalam bidang perlindungan sosial. Bank Dunia mencatat Brazil telah mengalokasikan 22 persen dari pendapatan domestik brutonya untuk belanja di sektor pendidikan,

Mengobati Ketimpangan Jangka Panjang

kesehatan, perlindungan dan jaminan sosial.

Hasilnya, laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa program tersebut berhasil menurunkan setengah dari angka kemiskinan ekstrem di Brazil dari 9,7 persen menjadi 4,3 persen. Tidak hanya itu, program tersebut juga berhasil menurunkan ketidakmerataan pendapatan di kalangan masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Satu dekade semenjak diluncurkan, program tersebut telah berhasil menurunkan angka gini rasio Brazil sebesar 15 persen.

Kesuksesan Brazil dalam menerapkan program *conditional cash transfer* tersebut menjadi salah satu referensi model pemerintah dalam menerapkan program perlindungan sosial di Indonesia. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (PFM Kemensos), Andi Z.A. Dulung, mengungkapkan manfaat apa saja yang diterima dari program tersebut. Menurutnya, penggunaan *financial technology (fintech)* melalui inklusi keuangan dapat menghindarkan adanya pemotongan dana bantuan sosial. Selain itu, teknologi juga akan mungurangi kesempatan untuk melakukan korupsi. Hal itu akan sangat membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan. Di sisi lain, alokasi anggaran APBN yang dikeluarkan dalam bentuk belanja sosial juga akan menjadi lebih tepat sasaran kepada orang miskin.

Belanja bansos sebagai *social safety net*

Dalam APBN 2017 telah dialokasikan anggaran untuk program Bantuan Sosial (Bansos). Sasaran program ini adalah meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan transformasi belanja bansos dari yang semula bersifat *unconditional cash transfer* menjadi *conditional cash transfer*. Andi menjelaskan bahwa BLT merupakan salah satu contoh dari *unconditional cash transfer*. Namun, untuk lebih memberdayakan masyarakat dan memperbaiki sistem dan akurasi penyaluran, perlu diberikan persyaratan tertentu. Tujuannya tak lain adalah untuk mendorong masyarakat agar menggunakan dana bansosnya secara lebih efektif dan tepat sasaran, serta tidak disalahgunakan.

Sementara itu, Kepala PK APBN, Rofy turut mengungkapkan peran strategis Belanja Sosial dalam APBN selain untuk program perlindungan sosial juga berfungsi sebagai *social safety net* dalam

menghadapi gejala/goncangan ekonomi. Misalnya, bansos yang direalisasikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan untuk setiap kenaikan harga BBM saat Indonesia masih menerapkan kebijakan subsidi BBM. Bantuan tersebut diberikan tanpa syarat (*unconditional cash transfer*) untuk melindungi keluarga miskin terhadap dampak ekonomi akibat peningkatan harga BBM. Harapannya, melalui bantuan tersebut masyarakat miskin dapat terjaga daya belinya.

Inklusi keuangan untuk pengurangan kesenjangan

Inklusi keuangan adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan di sektor jasa keuangan dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anggar B. Nuraini, menjelaskan bahwa inklusi keuangan telah menjadi salah satu prioritas dari pemerintah saat ini. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 bahwa salah satu sasaran penguatan sektor keuangan dalam lima tahun ke depan adalah meningkatnya akses keuangan masyarakat dan umum terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, Anggar berpendapat perlu adanya pemberdayaan program inklusi keuangan antara lain dengan

penyaluran bansos secara nontunai, transformasi subsidi nontunai, pembayaran nontunai, dan pengembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adanya ketersediaan akses keuangan di daerah akan membuat masyarakat lebih mudah dalam mengenal produk dan layanan jasa keuangan. Lebih lanjut, hal itu akan mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan keuangan dan membuat masyarakat beralih dari kegiatan yang bersifat konsumsi menjadi investasi. Ke depannya, hal tersebut akan berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pengurangan kesenjangan pendapatan.

Terkait program perlindungan sosial yang menggunakan teknologi keuangan atau *e-waroeng*, Direktur PFM Kemensos, Andi menjelaskan bahwa diharapkan dengan *e-waroeng* akan ada perputaran uang di desa atau daerah. Di sisi lain, Andi mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberdayakan enam juta peserta program keluarga harapan (PKH) untuk menjadi sasaran utama pemberian modal program *e-waroeng*. Dengan begitu, mereka bisa belajar untuk berusaha secara mandiri. Selain menerima modal, mereka juga bertindak sebagai konsumen penerima pencairan bansos melalui kartu elektronik, serta sekaligus merangkap menjadi agen bank. Harapannya dengan program tersebut, mereka akan memiliki penghasilan yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta meningkat literasi keuangannya.

Teks Abdul Aziz



Murid Sekolah Dasar di Indonesia Timur.

Foto
Gatot
Soebroto

Ekonomi tumbuh tinggi, namun ketimpangan tetap rendah. Begitu harapan semua negara berkembang. Hal ini dikarenakan semakin tinggi ketimpangan, semakin rentan masyarakat terhadap gejala isu-isu sosial. Situasi negara yang tenang dan stabil perlu investasi jangka panjang. Diantaranya melalui pendidikan dan infrastruktur.

Pendidikan

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, ketimpangan terjadi karena ketidaksetaraan kesempatan, termasuk pendidikan. Agar semua penduduk mendapat akses pendidikan yang sama, dalam APBN 2017 pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp416,1 triliun atau dua kali lipat dibanding anggaran tahun 2006. Tetapi yang terpenting adalah anggaran tersebut benar-benar bisa meningkatkan kualitas manusia Indonesia. “Anggaran pendidikan kita selama ini naik, tapi apakah Anda merasakan kualitas yang meningkat tajam?” tanya Menkeu.

Senada dengan Menkeu, Ahmad Baedowi, Direktur Yayasan Pendidikan Sukma menyampaikan bahwa konsentrasi pendidikan Indonesia masih terpusat di kota-kota besar yang memiliki sarana lebih baik. Hal ini juga terlihat dari komponen indeks pembangunan manusia yang lemah. Ahmad mengungkapkan, indikator rata-rata lama pendidikan setiap anak Indonesia kurang membanggakan, meski telah merdeka lebih dari setengah abad. Angka tertinggi dimiliki Jakarta, (9,7 atau setara dengan lulus SLTP) dan terendah adalah Nusa Tenggara Barat (5,2 atau setara kelas V SD) dan Kota Sampang, Jawa Timur (2,5 atau tidak sampai kelas III SD).

Ahmad bersyukur Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 telah mewajibkan satuan pendidikan menengah dan tinggi yang diselenggarakan pemerintah untuk mengalokasikan tempat bagi siswa kurang mampu setidaknya 20 persen. “Penting digarisbawahi kalimat ‘memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi’ sebagai titik tolak kritik kita. Akan seperti apa kira-kira pemaknaan dan implementasi dari kebijakan ini?,” ujar Ahmad.

Di sisi lain, Teguh Dartanto, Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEUI mengatakan, pendidikan memang dapat pengurangan

kemiskinan, namun tidak serta merta mengurangi ketimpangan. “Kita harus melihat lebih dalam. Pendidikan dasar sudah terbukti cenderung menurunkan ketimpangan. Namun, pola 20 tahun terakhir memperlihatkan bahwa jika pemerintah berinvestasi pada pendidikan tinggi, justru akan meningkatkan ketimpangan,” ujar Teguh. Pendidikan tinggi memberi peluang bagi seseorang untuk mendapat penghasilan yang lebih tinggi, sementara pada masyarakat kelas bawah, pertumbuhannya tidak terlalu banyak. Akibatnya, bertendensi memperlebar ketimpangan.

Ditanya mengenai keberhasilan negara Skandinavia seperti Finlandia dalam investasi pendidikan, Teguh mengatakan bahwa kondisi di Indonesia jauh berbeda. “Finlandia itu negara kecil dan penduduknya homogen. Mereka bisa hidup setara bukan karena pendidikan, tetapi karena sistem pajaknya yang baik. Penghasilan semua orang dipotong sangat tinggi untuk kemudian didistribusikan kembali dalam bentuk layanan publik,” ucap Teguh.

Pembangunan infrastruktur

Dalam hal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, Korea Selatan (Korsel) sudah tidak diragukan lagi. Sebelum produk-produknya menguasai dunia, Korsel sudah terlebih dahulu menyediakan infrastruktur yang mumpuni untuk mendukung industri-industri unggulan.

Sama halnya dengan Korsel, untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, Presiden Jokowi mengenalkan konsep membangun

dari pinggiran dan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas. Dalam berbagai kesempatan, Menkeu juga mengatakan bahwa infrastruktur harus dapat menysasar masyarakat kecil. Menurutnya, infrastruktur akan menopang ekonomi inklusif yang dapat mengurangi ketimpangan.

Teguh meyakini, infrastruktur merupakan mesin pertumbuhan. Namun, belum tentu mampu mengurangi ketimpangan. “Kalau kita fokus dengan proyek-proyek besar, kemungkinan justru akan memperbesar ketimpangan. Sebab, proyek nasional biasanya dikerjakan oleh perusahaan besar atau BUMN dengan segelintir SDM berpendidikan baik,” ujarnya.

Menurut teguh, infrastruktur baru akan mengurangi ketimpangan jika setiap proyek besar dihubungkan dengan proyek lokal. Dicontohkan Teguh, ketika pemerintah pusat membangun pelabuhan di Papua, pembangunan tersebut harus dihubungkan dengan pembangunan jalan ke suatu daerah agar masyarakat daerah tersebut turut merasakan manfaatnya.

Teguh menambahkan, perbaikan ketimpangan justru akan terjadi jika pemerintah daerah mendorong ketersediaan infrastruktur dasar seperti jaringan air minum atau sanitasi yang bisa dimanfaatkan seluruh masyarakat. “Sebab itu, jika dikelola dengan benar, saya percaya dana desa akan berdampak positif pada pengurangan ketimpangan ekonomi,” tutup Teguh.

Teks Irma Kesuma



Pajak Solusinya

Bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kesetaraan di Indonesia bukanlah impian yang jauh di mata. Pemberantasan ketimpangan ekonomi merupakan tantangan. Namun kini Indonesia telah selangkah lebih maju. Reformasi Perpajakan telah digalakkan. Kerja sama internasional dalam pertukaran informasi pun akan segera direalisasikan. Berikut pandangan Menkeu mengenai ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia yang kami kutip dalam acara Peluncuran Laporan Ketimpangan oleh Oxfam di Jakarta pada Februari 2017.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Oxfam dan INFID (forum LSM internasional untuk pengembangan Indonesia) merilis hasil laporan mengenai tingginya ketimpangan di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini?

Saya senang Oxfam dan Infid bisa meneliti kebijakan pemerintah. Tapi saya juga ingin mengajak para NGO (*nongovernment organization*) untuk benar-benar meneliti bahwa saat ini banyak fungsi dan tanggung jawab pemerintah pusat yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Diharapkan pemerintah daerah bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi *unequal opportunity* (kesempatan yang tidak setara), yaitu melalui pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Hal itu merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

tidak ada lagi tempat tersembunyi bagi para pengem- plang pajak.

Sri Mulyani
Indrawati
Menteri
Keuangan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka rasio gini Indonesia telah turun sebesar 0,003 poin menjadi 0,394 pada September 2016. Namun ketimpangan antara perkotaan dan pedesaan masih sangat lebar. Apa sebenarnya tantangan terbesar pemerintah untuk mengatasi hal ini?

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Namun pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis selalu bisa menciptakan kesetaraan. Indonesia sebagai *emerging country* dalam sepuluh tahun terakhir sebenarnya memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi yang tidak buruk. Indonesia bahkan termasuk salah satu negara yang memiliki pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Satu dekade terakhir ini diwarnai dengan krisis ekonomi dunia pada tahun 2008–2009. Bila ada satu negara yang dalam satu dekade terakhir memililiki pertumbuhan ekonomi tinggi, itu adalah suatu pencapaian. Untuk Indonesia, dampak 1 persen dari pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan ternyata tidak selalu sama. Tahun 2011–2012, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi, kemiskinan turun sebesar 0,106 persen. Sedangkan tahun 2013–2014, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi, hanya menurunkan kemiskinan sebesar 0.033 persen.

Bagaimana kondisi kemiskinan di Indonesia saat ini?

Dari sisi konsentrasi kemiskinan, kantong kemiskinan Indonesia masih terkonsentrasi di daerah pedesaan dan di pulau Jawa. Bila kita melihat persentase kemiskinan terbesar tetap berada di pulau-pulau luar Jawa, seperti di Maluku dan Papua yang bisa mencapai 21,9 persen. Pemerintah memandang hal ini sebagai sesuatu yang dilematis.

Ketimpangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008–2012 mengalami peningkatan. Presiden Jokowi menyadari, masalah ketimpangan ini bukanlah hal yang bisa dikesampingkan. Masalah ketimpangan harus menjadi pusat perhatian dari kebijakan pemerintah. Ini adalah tantangan kami untuk meletakkan setiap rupiah dari sisi Belanja APBN untuk diletakkan di mana, kepada siapa, dan dalam bentuk apa.

Apa evaluasi pemerintah terhadap penyebab mendasar tingginya ketimpangan di Indonesia?

Salah satu penyebab kesenjangan ini adalah *unequal opportunity*. Kemiskinan itu bisa diwariskan

(*intergenerational poverty*). Karena orang miskin tidak bisa sekolah, bahkan dari saat masih di kandungan dan lahir dia tidak mendapatkan gizi yang cukup. Sehingga walaupun dia mendapat sekolah gratis, dia tidak bisa berpartisipasi di sekolah karena perkembangan otaknya tidak berkembang dengan baik semenjak berada di kandungan. Jadi bila kita membicarakan intervensi, seharusnya dilakukan sejak dini.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah pusat banyak melakukan intervensi pada pemerintah daerah. Dalam kebijakan fiskal pemerintah tahun 2017, anggaran transfer ke daerah jauh lebih tinggi daripada belanja Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sekitar Rp745 triliun. Hal ini menggambarkan peran pemerintah daerah kini menjadi sangat penting.

Pemerintah telah membentuk Tim Reformasi Perpajakan pada akhir tahun 2016 sebagai sarana untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak. Bagaimana Anda memandang upaya ini dikaitkan dengan penurunan angka ketimpangan di Indonesia?

Kebijakan ini bermula dari adanya konsentrasi kekayaan kepada beberapa kelompok kecil (*high wealth concentration*). Hal ini menjadi tantangan pemerintah bagaimana melakukan koreksi terhadap kondisi tersebut. Instrumen pajak merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidaksetaraan. Bukan berarti orang kaya harus bayar pajak lebih dan orang miskin tidak perlu bayar pajak. Saya merasakan, reformasi perpajakan adalah sebuah tantangan dan PR yang luar biasa tidak mudah.

Tantangan terbesar adalah menghimpun pajak, khususnya saat ini orang bisa menyembunyikan aset dengan mudah. Bagusnya, saat ini telah ada kesepakatan internasional untuk berkoordinasi dalam penghindaran pembayaran pajak (*tax evasion*). Untuk itu, *Automatic Exchange of Information* (AEOI) sangat diperlukan.

Maka, kita harus memperbaiki peraturan dan Undang-Undang, termasuk membenahi institusi agar Direktorat Jenderal Pajak memiliki akses informasi tanpa terhalangi dan memberikan akses kepada negara lain. Kalau itu dilakukan, saya optimis dunia ini akan menjadi lebih baik. Saya juga berharap masyarakat dan NGO bisa mendukung AEOI ini dan mengawasi institusi pemerintah agar bersih bebas korupsi. Kita harus mendeklarasikan bahwa tidak ada lagi tempat tersembunyi bagi para pengemplang pajak.

Teks Pradany Hayyu

Reportase

Amnesti Pajak Tahap Akhir Kembali Diingatkan



Foto dok. Biro KLI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan *Farewell Tax Amnesty* pada Selasa (28/02). Presiden Jokowi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan sekitar kurang lebih 14 ribu wajib pajak (WP) yang terdiri atas kalangan pengusaha yang bergabung dalam Apindo, masyarakat umum, praktisi perpajakan menghadiri acara *Farewell Tax Amnesty* tersebut di JIEXPO Kemayoran. Acara ini diselenggarakan satu bulan sebelum masa Amnesti Pajak berakhir dengan tujuan memberi kesempatan pada seluruh Wajib Pajak (WP) untuk memanfaatkan waktu yang hanya sampai 31 Maret 2017.

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan masih terdapat sisa waktu satu bulan untuk mengikuti *Tax Amnesty*. “Ini kesempatan terakhir. Saya ingatkan ini kesempatan terakhir karena Kemenkeu sedang mempersiapkan *draft* peraturan untuk WP yang tidak ikut atau ikut setengah-setengah.” Presiden juga mengingatkan bahwa pada 2018, *Auotomatic Exchange of Information* (AEOI) akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, tidak akan ada lagi tempat menyembunyikan harta dari pajak di seluruh negara di dunia. Pemerintah tengah merumuskan peraturan untuk mendukung keterbukaan informasi perpajakan ini.

Menkeu menegaskan bahwa setelah selesai amnesti pajak, pemerintah akan menggunakan semua data yang ada untuk melacak WP yang belum taat membayar pajak. Kapolri, Panglima TNI serta Jaksa Agung telah menyatakan dukungannya dalam

pelaksanaan pelacakan potensi pajak tersebut. “Sekarang kami akan membedah berdasarkan sektor usaha, pelaku, size, dan kita akan menggunakan semua data yang ada termasuk bea cukai, di perpajakan, di perindustrian, sampai ke daerah untuk kita melacak. Jadi mohon dimaklumi bahwa kami akan melakukan pelaksanaan UU pajak secara konsisten,” jelas Menkeu.

Saat ini, terdapat 682.882 WP yang telah terdaftar turut serta dalam program amnesti pajak. Namun jumlah ini masih sangat kecil mengingat jumlah WP di Indonesia sebanyak 32.6 juta dengan jumlah WP yang wajib lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah 29.3 juta. Dari jumlah tersebut hanya 12.6 juta yang sudah melaporkan SPT. Oleh karena itu, Menkeu terus mengajak seluruh WP serta mengajak Apindo, Polri, Kejaksaan dan TNI untuk terus mengawal Amnesti Pajak sampai program ini berakhir. Tidak lupa, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh komponen yang telah ikut menyukseskan program amnesti pajak ini.

Teks Dewi Rusmayanti



Foto
Dok. Biro KLI

Menkeu Hadiri Pertemuan G20 di Jerman

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menghadiri pertemuan G20 Finance Minister and Central Governors Meeting di Jerman pada (17/03). Pertemuan ini didahului dengan, “High Level Symposium on Global Economic Governance in a Multipolar World”, dan dihadiri oleh para Menteri dan tokoh ekonomi terkemuka dunia. Pada acara tersebut, Menkeu menegaskan kesiapan Indonesia sebagai anggota G20 untuk berpartisipasi dalam kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI).

Menurut Menkeu, kerja sama bidang perpajakan internasional ini penting untuk mengatasi penghindaran pajak, salah satunya terkait Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 secara bulat menyepakati agar program AEOI dan BEPS sepenuhnya diimplementasi mulai September

2017, dan selambat-lambatnya pada September 2018. Indonesia berharap dengan implementasi program kerjasama tersebut, ‘loophole’ bagi praktek-praktek penghindaran pajak internasional dapat dihilangkan. “Serta tidak ada lagi negara yang menggunakan perbedaan sistem pajak untuk melakukan inovasi instrumen keuangan yang bertolak belakang dengan semangat BEPS dan AEOI,” tegas Menkeu.

Selain itu Menkeu juga menyampaikan pandangannya terkait komitmen G20 terhadap kerja sama global dan perdagangan dunia. Hal ini berkaitan dengan perubahan pandangan Amerika Serikat terhadap perdagangan global dan kerja sama multilateral. Indonesia mengingatkan bahwa G20 harus mampu menjaga komitmennya sehingga tidak mengancam kredibilitas kerjasama G20 sendiri. Pandangan ini kemudian disambut oleh para Menkeu negara-negara G20 yang memberikan dukungannya mengenai perlunya penegasan komitmen ini dilakukan.

Teks Dewi Rusmayanti

Membangun Rezim Anti Pencucian Uang



Foto
Anas Nur Huda

Transaksi keuangan sejatinya bertujuan memudahkan aktivitas masyarakat. Sayangnya, kegiatan ini masih sering disalahgunakan dalam beragam tindak pidana. Ki Agus Badaruddin, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menceritakan kepada Media Keuangan perjuangan untuk memberantas pencucian uang.

Bagaimana Anda menggambarkan tugas PPATK?

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, PPATK juga terlibat dalam usaha memerangi terorisme dan pendanaannya. Dalam pelaksanaannya, PPATK melakukan pengumpulan data, menganalisis data yang diperoleh, dan dalam keadaan tertentu juga melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, maka hasil analisa atau pemeriksaan tersebut disampaikan kepada penegak hukum yang berwenang seperti KPK, Polri, Kejaksaan, atau BNN. Hasil analisis ada juga yang digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam pengangkatan pejabat negara.

Dalam kondisi apa seseorang dapat dikatakan melakukan pencucian uang?

Seseorang yang menghasilkan uang dari kejahatan, biasanya tidak akan menyimpan uang tersebut di rumah dan tidak dinikmati. Dia akan berusaha menggunakan uang itu, namun dengan cara yang aman dan tidak menimbulkan pertanyaan. Hampir seluruh pelaku kejahatan yang menghasilkan uang akan mencuci uang tersebut. Kalau tidak dicuci, sulit untuk menggunakan uang itu secara bebas.

Pengertian pencucian uang adalah upaya untuk mengaburkan, menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. Dikelola sedemikian rupa sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Caranya dengan memasukkannya ke dalam sistem keuangan atau bertransaksi dengan pihak lain. Biasanya, melalui banyak rantai. Setelah sumber uang tersebut dirasa sudah tidak dapat dikenali lagi, dia akan menariknya kembali dari sistem keuangan untuk digunakan dengan aman.

Jadi, seseorang dapat dikatakan melakukan pencucian uang apabila dia memiliki uang hasil kejahatan serta melakukan proses transfer, pembayaran, penyimpanan atau mengubah bentuk harta kekayaan dengan tujuan untuk menyembunyikan. Bisa juga dengan membeli harta dengan menggunakan nama pihak menggunakan hasil kejahatan tersebut.

Seberapa besar pencucian uang dan pendanaan terorisme saat ini?

Semakin lama semakin besar. Agak susah menghitungnya, tetapi yang jelas sangat besar. *National Riset Assesment* tahun 2015 lalu menyimpulkan bahwa kejahatan yang paling banyak melahirkan TPPU adalah korupsi, narkoba, pajak, kehutanan, dan perbankan.

PPATK kemudian mencoba memetakan upaya untuk penutup celah ini dengan berbagai cara. Misalnya, melalui kerjasama dengan penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, beragam organisasi profesi, serta aparat penegak hukum.

Sementara, untuk pendanaan terorisme, gambaran yang kami peroleh adalah pelaku dalam melakukan aksinya sangat sistematis dan transnasional. Mereka memanfaatkan lembaga atau yayasan yang berada di Indonesia untuk menerima atau menyalurkan dana terorisme. Sebab itu, kami bersama kementerian terkait lainnya terus mengawasi organisasi-organisasi non profit tersebut.

Apa bentuk pencucian uang yang paling banyak ditemukan?

Modus pencucian uang yang paling umum adalah dengan memanfaatkan fasilitas perbankan, namun dengan menggunakan nama orang lain yang berada di bawah kendali pelaku. Uang tersebut kemudian diputar ke berbagai

pihak. Misalnya melalui kerjasama dalam kegiatan usaha seperti SPBU, properti, perkebunan, atau ditukar dalam mata uang asing, ditempatkan pengelolaan saham, dan masih banyak lagi.

Apakah orang yang menerima uang dari pelaku juga dapat dinyatakan bersalah?

Dalam aturan TPPU, dikenal pelaku aktif yang melakukan kegiatan pencucian uang dan pelaku pasif yang hanya menerima atau menikmati hasil dari pencucian uang. Pelaku pasif turut dihukum dengan ancaman pidana lima tahun. Pelaku pasif tidak harus tahu secara rinci tindak pidana apa di belakang harta tersebut. Namun, dia dapat menduga harta itu bukan dari kegiatan yang sah karena adanya hal di luar kebiasaan atau kewajaran.

Bagaimana bila pelaku pasif tidak menyadarinya?

Lazimnya, ketika orang menerima suatu barang yang tidak wajar atau tidak biasa, akan timbul rasa kaget atau penasaran. Bisa karena jumlahnya atau karena jenis barangnya. Selanjutnya, kebanyakan orang akan bertanya perihal barang tersebut. Misalnya sumber perolehan atau tujuan pemberian. Bila barang tersebut diduga atau ternyata berasal dari kegiatan yang tidak sah, maka tidak akan diterima. Ketika si penerima tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka ia dapat dihukum sebagai pelaku pasif.

Prinsip ini umum digunakan dalam hukum pidana yaitu tentang dihukumnya penadah barang curian. Dalam tindak pidana penadahan, untuk dapat dihukumnya pelaku penadahan, tidak perlu dibuktikan tentang pencurian dan siapa pelaku pencurian itu. Cukup dia tahu atau setidaknya patut menduga bahwa barang yang dijual itu adalah dari hasil dari kegiatan yang tidak sah.



"Modus pencucian uang yang paling umum adalah dengan memanfaatkan fasilitas perbankan, namun dengan menggunakan nama orang lain yang berada di bawah kendali pelaku. Uang tersebut kemudian diputar ke berbagai pihak."

K.A. Badaruddin
Kepala PPATK

Bagaimana bila ternyata si penerima dibohongi oleh si pemberi? Penerima berhasil diyakinkan pemberi bahwa barang tersebut berasal dari kegiatan yang sah. Dalam kondisi tersebut, maka si penerima tidak dapat dipidana, meskipun nanti harta kekayaan yang telah diterimanya akan diambil.

Apa yang dapat masyarakat lakukan bila menerima dana cukup besar?

Misalnya, dalam rekeningnya Anto menerima sejumlah uang yang tidak jelas sumber dan tujuannya. Tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan klarifikasi administratif kepada pihak bank tentang kemungkinan adanya kesalahan. Anto dapat melaporkannya ke pihak kepolisian.

Bila Anto tidak melakukan hal tersebut, apalagi bila muncul niat memiliki dan mengambil uang tersebut, Anto dapat dikenakan ketentuan pidana tentang pencurian atau penggelapan. Ketika Anto menggunakan uang tersebut seolah-olah benar miliknya, maka Anto telah melakukan juga tindak pidana pencucian uang. Sebab itu, kami berharap masyarakat tidak gampang menerima sesuatu yang tidak jelas. Hati-hati dalam menerima sesuatu dari seseorang bila ada hal-hal yang lazim.

Seberapa efektif penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) pada lembaga keuangan?

Dalam TPPU, prinsip KYC disebut dengan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ). Sampai saat ini PMPJ telah dilakukan oleh sebagian besar pihak pelapor. PMPJ menjadi tolak ukur apakah suatu transaksi yang dilakukan mencurigakan atau tidak. Dengan membandingkan profil nasabah dengan transaksinya, maka dapat ditemukan hal-hal yang tidak wajar

dan mencurigakan. Laporan itulah yang selama ini menghasilkan pengungkapan berbagai kejahatan yang kita saksikan di berbagai media.

Seperti apa kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Bea dan Cukai (DJBC)?

Salah satu program kerja PPATK adalah meningkatkan kerjasama yang sudah terjalin dengan DJP dan DJBC. Dari 2011 hingga 2016 PPATK berkontribusi dalam penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp3,5 triliun. Pemasukan negara itu berasal antara lain dari pasokan data transaksi keuangan para penunggak pajak.

Ada dua jenis penyelidikan yang bisa dilakukan. Pertama, penyelidikan yang dilakukan atas permintaan DJP. Misalnya, ketika dalam pemeriksaan DJP menduga ada wajib pajak (WP) yang tidak jujur, maka bisa meminta kami untuk membantu menelusuri transaksi keuangannya.

Kedua, bisa juga kami yang mulai meneliti WP besar. Misalnya, ada WP dengan setoran pajak ratusan miliar melaporkan 30 rekening perusahaannya. Namun, analisis kami kemudian mengetahui ternyata perusahaan tersebut punya 70 rekening. Setelah ditelusuri ke bank bersangkutan, ternyata ditemukan laporan transaksi keuangan mencurigakan atau ada laporan transaksi tunai.

Kalau ternyata ada selisih omsetnya yang disembunyikan, berarti perusahaan tersebut telah melakukan upaya menggelapkan pajak. Laporan kurang bayar pajak tersebut, akan kami sampaikan kepada DJP untuk ditindaklanjuti. Nah, mudah-mudahan, kita akan bisa saling mendukung.

Teks Irma Kesuma Dewi

Mengawal Integritas Kemenkeu

Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai, Sekretariat Itjen

Peran Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai pengawal kepatuhan internal di lingkungan Kementerian Keuangan semakin optimal. Terlebih sejak dibentuk unit baru di bawah Sekretariat Itjen pada bulan Desember tahun 2015, yakni Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai (KVVP) di bawah Sekretariat Itjen. Ditemui di ruang kerjanya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan gedung Djuanda II lantai 5, Kepala Bagian KVVP Dudung Rudi Hendratna menyambut Media Keuangan dengan ramah.

Dudung Rudi Hendratna, Kepala Bagian KVVP

Sosialisasi Crash Program Surabaya

Foto
Anas Nur Huda

Wacana pembentukan Bagian KVVP telah dimulai sejak Juni 2015. Sebelumnya, tugas kepatuhan internal berada di bawah Inspektorat VII. Inspektorat VII berfungsi sebagai unit pengawasan internal Itjen. Pada dasarnya, lini pertahanan terbagi menjadi tiga yaitu manajemen, unit kepatuhan internal, dan internal audit. Saat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan disahkan, Inspektorat VII membawahi tiga lini pertahanan tersebut.

Untuk pembagian wewenang yang lebih tepat, Inspektorat Jenderal membentuk unit kepatuhan tersendiri dengan menggabungkan fungsi unit lain. Fungsi lain yang sangat penting dalam menjaga integritas pegawai Kementerian Keuangan yaitu verifikasi kekayaan pegawai. Kekayaan pegawai yang diverifikasi tersendiri merupakan bagian dari pencegahan korupsi.

Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015, Bagian KVVP memiliki tugas melaksanakan pemantauan pengendalian intern, standar proses bisnis, kode etik, disiplin, pengelolaan kinerja dan risiko, harmonisasi peraturan dan bantuan hukum, serta pemantauan kewajiban pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian KVVP membawahi tiga subbagian, yaitu Subbagian Pemantauan Pengendalian

Intern, Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko, dan Subbagian Verifikasi Pelaporan Perpajakan dan Harta Kekayaan.

Subbagian Pemantauan Pengendalian Intern bertugas khusus memantau kode etik pegawai Itjen. Subbagian ini berfungsi layaknya Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Itjen. Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko bertugas melakukan penerapan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko Itjen beserta bantuan hukum terkait pengawasan. Dua subbagian ini memiliki cakupan di lingkungan Itjen Kementerian Keuangan.

Subbagian Verifikasi Pelaporan Perpajakan dan Harta Kekayaan ini yang agak khas, yaitu lingkup kerjanya meliputi seluruh pegawai Kementerian Keuangan. “Jadi kami melakukan pemantauan,



pelaporan perpajakan, pelaporan harta kekayaan, LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara), dan LP2P (Laporan Pajak-pajak Pribadi),” ujar Dudung. Terkait LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), saat ini pemantauan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal. Namun Bagian KVVP juga turut melakukan pemantuan karena nantinya akan dilakukan tahap verifikasi dan klarifikasi.

Berbicara mengenai integritas memang tidak bisa dianggap sepiantas lalu. Mengingat pegawai Bagian KVVP banyak memegang rahasia kekayaan pegawai, maka Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (saat itu dijabat oleh Kiagus Ahmad Badaruddin) melakukan pengambilan sumpah jabatan khusus pada Juni 2016. Inspektur Jenderal berkali-kali menekankan bahwa pemantauan atau hukuman terkait kode etik jangan sampai bersifat kontra produktif. Artinya, pemantauan yang dilakukan oleh Bagian KVVP harus mampu meningkatkan kinerja.

Verifikasi, *clearance*, dan pemberantasan pungli

Cakupan verifikasi kekayaan pegawai yang meliputi seluruh pegawai

Kementerian Keuangan memberi tantangan tersendiri bagi Bagian KVVP. Untuk tahap awal, Dudung memprioritaskan verifikasi dilakukan pada seluruh pejabat Eselon II di seluruh Indonesia. Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian KVVP, target pejabat yang diverifikasi dan diklarifikasi berjumlah 2400 orang per tahun. Setidaknya Bagian KVVP melaukan verifikasi 200 pejabat tiap bulannya.

Dalam program Amnesti Pajak, Sekretariat Itjen bersama Bagian KVVP juga turut membantu menyukseskan program yang berlangsung sejak September 2016 hingga Maret 2017 tersebut. Bagian KVVP aktif melakukan verifikasi kekayaan pegawai dengan menyarankan pembetulan SPT bagi Wajib Pajak yang belum mengisi SPT secara lengkap. Pada prinsipnya, sebelum melakukan verifikasi terhadap pegawai lain, pegawai Itjen harus didahulukan. “Itjen harus menjadi contoh,” tegas Dudung.

Salah satu bentuk layanan yang dilakukan Bagian KVVP yaitu *clearance* harta kekayaan bagi pegawai yang ingin melakukan promosi jabatan. Pada dasarnya, proses *clearance* melibatkan tiga

unit yang terlibat, yaitu Inspektorat Bidang Investigasi (IBI), Bagian Sistem Informasi Pengawasan, dan Bagian KVVP.

Saat ini, Bagian KVVP tengah memproses Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai pelaporan harta kekayaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ke depan, para pegawai tidak perlu mengisi daftar harta kekayaan berulang kali untuk beberapa jenis laporan. Secara simultan, Bagian KVVP juga tengah bekerja sama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Kemenkeu untuk Aplikasi Laporan Harta Kekayaan (ALPHA).

Demi meningkatkan pemahaman kode etik di lingkup internal, Bagian KVVP telah melakukan beberapa kali sosialisasi kode etik dan verifikasi kekayaan pegawai di beberapa kantor vertikal Kementerian Keuangan. Selain itu, Bagian KVVP juga menginisiasi Forum Kepatuhan yang terdiri dari seluruh Unit Kepatuhan Internal (UKI) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Inspektorat Jenderal Kemenkeu melalui Bagian KVVP dan IBI juga berkomitmen untuk memberantas praktik pungli (pungutan liar). Aksi ini dilakukan dengan membentuk Tim Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli). Tim ini terdiri dari tiga kelompok kerja (pokja) yaitu pencegahan, penindakan dan yustisi, dan sekretariat. Ke depan, Tim Saber Pungli akan melakukan program *mystery guest* atau *secret customer* dengan mendatangi berbagai kantor pelayanan Kemenkeu untuk memastikan ada atau tidaknya praktik pungli. Dalam memberantas pungli, Bagian KVVP memfokuskan pada pencegahan. “Kami tidak hanya mengingatkan teman-teman untuk menghindari pungli, namun juga korupsi dan gratifikasi,” ujar Dudung menutup pembicaraan dengan Media Keuangan.

Teks Pradany Hayyu

Kepemimpinan Yang Merakyat

Sosok berbadan kurus, ceking, dan terlihat 'kuper' alias kurang pergaulan itu lebih senang berjalan atau bersepeda dengan sepeda reyot menuju ke sekolahnya. Meski ada opsi untuk diantar dengan mobil, ia tak malu untuk menggunakan transportasi 'rakyat' agar dapat belajar hidup sederhana. Sebagai anak pensiunan wakil rakyat, ia diajari hidup tanpa kemewahan oleh orang

tuanya. Bahkan, untuk menunjukkan keprihatinannya, ia dan saudara-saudaranya dilarang untuk tidur siang masa itu. Ialah Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan RI, salah satu pemegang jabatan penting yang menentukan keputusan strategis di institusi Kementerian Keuangan.

Sejak kecil Mardiasmo sudah dididik untuk menjalani hidup merakyat.



Orang tuanya mengajarkan untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Wejangan singkat dari ayahnya untuk menghindari korupsi menjadi pesan kuat yang ditanamkan dalam benaknya. Sebagai wakil rakyat kala itu, ayahnya juga mengajarkan asas kerakyatan, sehingga ia mempunyai prinsip keadilan sosial bagi rakyat kecil. Hal itu pula yang menjadikan Mardiasmo berprinsip bahwa kepemimpinan yang bagus akan diikuti oleh *followership* yang bagus.

Kemandirian dan perjuangan

Semenjak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Mardiasmo sudah mandiri untuk membantu memikul kehidupan keluarga. Secara rajin ia berjualan di warung kelontong kecil depan rumahnya. Barang-barang seperti rokok, teh, bensin, dan keperluan sehari-hari ia beli dari tempat lain untuk dijual kembali di warungnya. Jika hasil jualan itu masih dirasa kurang, Mardiasmo tak lelah mencari akal untuk menambah penghasilan bagi keluarga. Ia mencoba beternak ayam jenis *leghorn* atau petelur. Telur yang dihasilkan itu ia jual sebagian atau dikonsumsi untuk kebutuhan sendiri. Dengan begitu, hasil yang ia peroleh bisa membantu menyekolahkan dirinya sendiri dan kakak-kakaknya sampai lulus menjadi dokter dan insinyur.

Yang menarik, ayah Mardiasmo pernah berpesan agar salah satu dari anak-anaknya bisa menjadi penerusnya di bidang ekonomi. Pertama kali Mardiasmo mendaftar ke perguruan tinggi, ia mengambil jurusan Teknik Sipil di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dan jurusan Teknik Kimia di Universitas Gajah Mada (UGM). Di kedua universitas tersebut, ia diterima. Namun, salah satu kakaknya teringat pesan ayah untuk menjadi salah satu penerusnya.

Karena kakak-kakaknya tidak ada yang mengambil jurusan ekonomi, ia pun berpikir dan mengalah untuk melanjutkan perjuangan ayahnya di bidang ekonomi dengan jurusan akuntansi.

Waktu itu, tak mudah masuk ekonomi jurusan akuntansi dan menjadi seorang akuntan yang jumlahnya masih terbatas. Apalagi sewaktu SMA, ia berasal dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Namun, berkat perjuangan kerasnya, ia berhasil mendapatkan nilai yang memuaskan. Para dosen saat itu memujinya karena kemampuan matematikanya yang mumpuni. Dengan alasan itu pula, ia diangkat sebagai asisten dosen di UGM. Kemampuan sebagai asisten dosen itu mengantarkannya untuk mengajar di beberapa perguruan tinggi lainnya. Sebagai mahasiswa dengan uang jajan *pas-pas-an* saat itu, Mardiasmo merasa cukup terbantu dengan kegiatannya sebagai asisten dosen yang memberikan tambahan penghasilan.

Filosofi kepemimpinan

Mardiasmo memiliki filosofi dalam hidup yang tak muluk. Menurutya, yang disebut pemimpin itu adalah seperti Ki Hadjar Dewantoro. Dengan semboyan ‘Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut Wuri Handayani’, Mardiasmo menerjemahkan semboyan tersebut ke dalam pola kepemimpinannya saat ini. Selain itu, ia juga memegang prinsip ‘*Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake*’ yang artinya berjuang tanpa perlu membawa kekuasaan atau kekayaan dan menang tanpa merendahkan atau mempermalukan. Ia mencontohkan ketika ia memimpin di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan, ia menggunakan pendekatan personal terhadap bawahannya. Jika ada sesuatu hal yang kurang tepat, maka ia akan mencoba

untuk membicarakan empat mata.

Begitu pula ketika ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) di Kementerian Keuangan. Ia merasakan betul besarnya tanggung jawab untuk mengelola dan membagi dana transfer ke daerah yang saat itu mencapai Rp340 triliun secara adil ke semua daerah di Indonesia. Untuk menerapkan asas keadilan, ia berkomitmen untuk menerapkan *formula* dan *rule based* dalam pengalokasian dana transfer tersebut. Formula itu dihitung dengan mengikutsertakan tim independen dari kalangan profesional dan akademisi, seperti Bambang Brodjonegoro dan Armida Alisjahbana. Meski tekanan politik dari berbagai kalangan sangat besar, ia merasa tidak perlu takut karena satu rupiah pun tidak pernah ia terima. Begitu pula sebaliknya, ia tidak pernah memberikan satu rupiah atau fasilitas apapun kepada pihak-pihak tertentu. Dengan begitu, ia yakin keadilan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

Berguru dari orang tua

Ibunya, Soepasrin, merupakan satu-satunya orang yang pertama kali Mardiasmo pamiti sebelum melakukan tugas ataupun keinginan tertentu. Meski sudah berusia 87 tahun, ibunya menjadi sosok bijak dan inspiratif baginya. Semenjak kecil, Mardiasmo sudah terbiasa untuk memohon doa restu kepada kedua orang tuanya. Menurutnya, tidak ada yang bisa mengalahkan doa terkuat dari doa kedua orang tuanya.

Ayah Mardiasmo, Soemardi Yatmosoemarto, mempunyai pengaruh yang kuat dalam pembentukan karakter dirinya. Sepeninggal ayahnya, banyak pelajaran berharga yang masih selalu diingat. Ayahnya telah mengajarkan berbagai hal mulai dari hal sederhana



untuk hidup merakyat sampai dengan prinsip bahwa uang gajinya merupakan amanah dari rakyat, sehingga harus digunakan dengan sangat hati-hati. Tak hanya itu, filosofi kerakyatan dari ayahnya juga diterapkan oleh ibunya. Sampai saat ini, ibunya hanya ingin menjaga keaslian warisan rumah kerakyatan dari suaminya. “Nanti kalau saya meninggal, seperti ini saja rumahnya. Jangan ditambah-tambah. Paling kalau bocor ya diganti. Tapi aslinya begini. Ini pemberian suami saya tercinta dan itu adalah rumah rakyat, hasil dari uang rakyat. Jadi jangan (ditambah yang) macam-macam,” pesan ibunya.

Berbagi waktu dengan keluarga

Meski mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dengan jadwal yang padat, Mardiasmo selalu mengutamakan waktu khusus bagi keluarganya. Setidaknya, ia menghabiskan waktu akhir pekan untuk berkumpul bersama istrinya, Retno Setyowati, dan ketiga anaknya Diaswati Mardiasmo, Diashati Ramadhani Mardiasmo, dan Diasdeviana Mardiasmo. Apabila memang ada kegiatan kantor di akhir pekan, ia

tetap mengutamakan komunikasi melalui telepon atau sarana komunikasi *online* seperti *whatsapp*.

Sebagai ayah, ia selalu memprioritaskan kualitas komunikasi dengan anak-anaknya. Untuk itu, ia lebih menyenangi kegiatan yang bisa melibatkan semua elemen keluarga. Misalnya, melakukan olahraga renang yang bisa diikuti oleh semua keluarga, pergi ke salon bersama-sama, atau menonton film bersama anak-anak dengan judul film yang tak jarang ia harus mengalah dengan pilihan anaknya. Dengan begitu, ia bisa melanjutkan kegiatan bersama keluarganya dengan makan malam, sembari meningkatkan komunikasi dan hubungan dengan keluarga.

Api semangat dan harapan

Pola pikir bahwa kerja sebagai *passion* dan keikhlasan adalah salah satu api (semangat) bagi Mardiasmo. Ia punya komitmen untuk mengabdikan kepada negara secara *lillahi ta’ala*. Ia juga selalu mendapat semangat dari sang Ibu. Selain itu, Mardiasmo sangat bersyukur selalu



Mardiasmo selalu minta doa restu Ibu.

Mardiasmo bersama dengan keluarga saat wisuda putrinya.

Foto
Dok. Pribadi

mendapat pemimpin dari kalangan profesional, sehingga ia bisa belajar banyak dari mereka. Sebut saja beberapa sosok maestro ekonomi yang pernah menjadi pimpinannya seperti Boediono, Sri Mulyani Indrawati, dan Bambang Brodjonegoro.

Sosok penyuka makanan tak pedas ini mempunyai harapan untuk membukukan semua pengalaman berharganya. Di usia yang akan menginjak kepala enam ini, ia berharap agar pengalaman dan pembelajaran hidupnya bisa dikenang, bukan dikenal. Tujuannya agar semua pengalaman dan pengetahuannya tidak mati dan dapat diberikan kepada para penerus bangsa sebagai sebuah pembelajaran yang berharga. Di sisi lain, ia juga mempunyai keinginan untuk membukukan ilmunya terkait akuntansi sektor publik atau kebijakan publik sebagai sebuah *lesson learned*, melengkapi buku *best seller*-nya di bidang pajak dan otonomi daerah.

Teks Abdul Aziz

Trump, Proteksionisme, dan Harapan pada Asia

Seorang pebisnis datang mengunjungi peramal. Pebisnis itu bertanya, “Apa hal yang dipikirkan oleh Donald Trump?” Sebelum menjawab pertanyaan si pengunjung, peramal itu harus terlebih dahulu beranjak ke ruang sebelah. Di sana, seorang pelanggan lain telah menunggu. Dia mengajukan pertanyaan yang sama kepada sang peramal, “Apa yang sedang saya pikirkan?” Ya, pelanggan lain itu adalah Donald Trump.

Sketsa karikatur di atas dimuat majalah ternama *The Economist* untuk menggambarkan ketidakpastian perekonomian global saat ini. “Semua orang bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Presiden Trump,” kata Menteri Keuangan 2013-2014, Chatib Basri, saat menjadi pembicara pada acara komunitas pegawai muda Kementerian Keuangan, Mezzanine Club, di Jakarta pada Kamis (23/2) lalu.

Menurut Chatib, apa yang sering disebut dengan *Trumponomics* akan banyak bertumpu pada ekspansi fiskal berupa peningkatan belanja pemerintah yang disertai dengan pemangkasan pajak. Hal ini secara langsung berdampak pada defisit anggaran yang semakin besar di Amerika Serikat (AS). Untuk membiayai defisit, pemerintah AS perlu banyak menerbitkan utang. Saat permintaan terhadap surat utang naik,

maka bunganya pun turut naik. Sebelum Presiden Trump terpilih, *yield* dari *bonds* di AS sebesar 1,6 persen. Sekarang, lanjut Chatib, tingkat suku bunganya naik menjadi berkisar 2,4 persen. Bank Sentral AS, The Fed, diperkirakan akan menaikkan suku bunga dua hingga tiga kali 25 basis poin (0,25 persen) pada tahun ini.

Kenaikan suku bunga The Fed diprediksi akan membuat Bank Indonesia (BI) harus juga menaikkan suku bunga. Jika hal ini tidak dilakukan, maka di akhir tahun, BI dikhawatirkan tidak akan mempunyai ruang untuk menurunkan suku bunganya. Apa implikasinya? Chatib berujar, “Investasi akan terganggu.”

Kebijakan The Fed menaikkan tingkat suku bunga akan menyebabkan dolar kembali masuk ke negeri Abang Sam. Di lain sisi, Jepang dan beberapa negara Eropa tengah menerapkan *negative interest rate*. Dengan melakukan kebijakan ini, perbankan di sana akan punya suku bunga negatif, sehingga alih-alih mendapatkan bunga, deposit nasabah malah akan dikenakan biaya. Hal ini memacu pemilik modal untuk mengarahkan uangnya ke luar negeri.

Indonesia, dengan kondisi makroekonomi yang relatif stabil dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain, akan menjadi tujuan para investor “menaruh

uang”. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang termasuk paling baik di kawasan telah menambah daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi. “Itu yang menjelaskan mengapa tiap kali DJPPR (Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko) mengeluarkan *bonds*, bisa sampai empat kali *oversubscribed*,” ujar Chatib.

Tingginya minat terhadap surat utang pemerintah adalah hal yang positif. Namun, pemerintah dipandang perlu mengantisipasi jika terjadi guncangan ekonomi. Dengan komposisi kepemilikan surat utang sebanyak 30 persen oleh investor asing, maka pemerintah harus memikirkan bagaimana jika dana di pasar surat utang keluar sebagai efek guncangan terhadap perekonomian global.

Chatib menilai, *capital income* yang masuk ke Indonesia dapat membuat nilai rupiah terkerek, meskipun dolar AS kembali ke negara asalnya. Menurutnya, secara umum nilai tukar rupiah pada tahun ini akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dua peristiwa di atas.

Perekonomian global juga akan dipengaruhi oleh kesepakatan negara-negara anggota OPEC untuk memangkas produksi minyak. Dampaknya adalah kenaikan harga minyak. Namun, pada saat yang sama, harga komoditas pun diramalkan akan beranjak dari stabil pada



Menteri Keuangan 2013-2014, Chatib Basri, saat memberikan paparan mengenai kondisi ekonomi global terkini pada acara komunitas Mezzanine Club di Jakarta, Kamis (23/2).

Foto
Andi Abdurrochim

2016 menjadi mengalami kenaikan pada tahun ini, meskipun tidak terlalu drastis. Pengaruhnya terhadap perekonomian domestik adalah pada kenaikan ekspor dan penerimaan pajak yang juga akan lebih baik.

Dampak proteksionisme

Chatib memandang pemerintah perlu juga memantau efek perlambatan ekonomi Cina. Bagaimana negeri Tirai Bambu dapat bertahan dari rencana proteksionisme perdagangan AS di masa kepemimpinan Presiden Trump turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. “Jika ekonomi Cina melambat satu persen saja, maka pengaruhnya akan sangat besar, hingga mencapai 0,7 persen PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia,” kata dia.

AS dan negara-negara maju dinilai tidak nyaman lagi dengan kondisi perdagangan bebas saat ini. Oleh karena itu, paham ekonomi cenderung mengarah pada proteksionisme. “Kita juga perlu mewaspadai terjadinya proteksionisme ekonomi di berbagai negara Eropa dan AS,” ujar Chatib. Selama ini, argumen yang dipercayai adalah negara-negara berkembang menjadi “korban” berkembangnya globalisasi. Perekonomian dunia nyatanya bergerak pada arah yang bertabrakan dengan

argumen tersebut dengan adanya kecenderungan naiknya popularitas paham proteksionisme.

Cina dan negara-negara berkembang dipandang lebih banyak mendapatkan manfaat dari globalisasi. “Kemenangan Trump dan Brexit adalah refleksi dari penolakan terhadap globalisasi,” ujar Chatib. Begitu juga meningkatnya pamor calon presiden yang juga pemimpin partai sayap kanan, Marine Le Pen di Perancis.

Pertanyaannya kemudian, apa yang harus dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk menyiasati tren kebijakan ekonomi proteksionisme? Menurut Chatib, cerita kesuksesan negara-negara di Asia Timur seperti Cina, Korea Selatan, dan Jepang yang mengembangkan sektor perdagangan dan industrialisasi menjadi sulit untuk diulang. Bagi Indonesia, pengembangan sektor jasa, pembangunan manusia, dan

percepatan pembangunan infrastruktur perlu dipikirkan secara serius sebagai rencana masa depan. Di samping itu, penguatan kerja sama dengan negara-negara di kawasan seperti ASEAN dan Australia juga perlu dilakukan.

Cukup baik

Saat ini, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen, sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia cukup baik. “Not because we are doing great, but because the other parts of the world are in trouble,” kata Chatib. Menurutnya, kita tidak bisa membandingkan perekonomian Indonesia dengan Vietnam dan Filipina yang cenderung tumbuh lebih tinggi. Cara yang adil untuk mengetahui posisi ekonomi Indonesia di panggung global adalah membandingkannya dengan negara-negara yang karakteristiknya sama, misalnya negeri produsen sumber daya alam, seperti Australia, Brazil, Meksiko, dan Nigeria. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari negara-negara penghasil *natural resources* yang lain,” ujar Chatib lagi.

Jika melihat indikator-indikator ekonomi dalam negeri, Chatib melihat konsumsi masyarakat dan swasta akan bangkit pada tahun ini. Begitu juga masuknya arus investasi sebagai dampak dari menariknya kondisi ekonomi dalam negeri dan kebijakan *negative interest rate* di sejumlah negara.

Inflasi diprediksi menghadapi kemungkinan kenaikan, tetapi masih pada level yang *manageable*. Sebaliknya, nilai tukar rupiah akan cenderung mengalami tekanan. “Tetapi ini bukan hal yang perlu terlalu dicemaskan. Nilai tukar yang terlalu kuat bisa tidak baik juga untuk kondisi ekonomi,” kata Chatib.

Pengelolaan fiskal akan berperan penting untuk mendorong perekonomian

dalam negeri. Kebijakan *keep buying strategy* lewat APBN bisa menjadi alternatif untuk menggerakkan sektor riil. “Misalnya dengan membuat proyek perbaikan jalan dan selokan. Idenya adalah memberikan uang (belanja pemerintah) kepada masyarakat,” ujar Chatib.

Risiko fiskal

Dalam kesempatan yang sama, Chatib juga menyoroti realisasi penerimaan pajak. Jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak pada 2015 dan 2016, pertumbuhannya hanya sekitar tiga persen. Sebagian pihak kemudian mempertanyakan kesuksesan kebijakan amnesti pajak. Menurut Chatib, situasi ini dapat dijelaskan dengan teori arbitrase. “Di dalam ekonomi, jika ada dua harga, maka akan terjadi arbitrase. Sukses dari *tax amnesty* terjadi at the expense of conventional tax,” kata dia. Jika ada tarif yang lebih murah, maka wajib pajak (WP) tentu akan memilih opsi tersebut, sehingga terjadi migrasi penerimaan dari pajak biasa ke penerimaan amnesti pajak. “Makanya *tax amnesty*-nya naik, tetapi penerimaan pajak total hanya naik tiga persen,” ujar Chatib menambahkan.

Di luar soal realisasi 2016, Chatib optimistis penerimaan pajak tahun 2017 akan lebih baik. Di samping faktor *rebound*-nya harga komoditas, penambahan sekitar 60 ribu WP baru dari program amnesti pajak dapat turut mendorong penerimaan negara. Begitu juga pajak yang bisa dikenakan dari hasil deklarasi aset sebesar lebih dari empat ribu triliun rupiah. Chatib memprediksi ada tambahan penerimaan pajak sebesar Rp50 triliun dari aset yang dideklarasikan, baik dari dalam maupun luar negeri.

” Komentor Pakar



Chatib Basri,
Menteri Keuangan
2013-2014

“Dengan kondisi *uncertainty* di AS, harapan dunia kini ada pada Asia. Kawasan ini menjadi satu-satunya tempat di mana ekonomi masih bisa tumbuh di atas lima persen. Dengan keadaan 50 persen ekonomi ASEAN ada di Indonesia, maka *role* kita menjadi sangat penting.

Jika AS menjalankan kebijakan proteksionisme, sedangkan Cina masih mengalami *slow down* pada ekonominya, maka kerja sama ASEAN dan Australia bisa menjadi penting. Mendekatkan diri dengan pasar Asia adalah opsi bagi pemerintah Australia.

Apa yang bisa dilakukan? Salah satunya, pemerintah Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah Australia untuk membuat *join quarantine* di bidang *customs*. Misalnya dengan membangun fasilitas itu di Surabaya.

Jika terjadi penolakan terhadap komoditas ekspor dari pengusaha Indonesia untuk masuk ke Australia karena tidak lolos uji kelayakan, maka *cost of transport* bisa lebih kecil. Biaya pengembalian menjadi lebih murah jika dibandingkan dengan mengirimkan barang tersebut dari tempat karantina di Darwin, Australia. Kebijakan ini bisa menjadi *encouragement* tersendiri di sektor perdagangan. Hal ini juga yang saya maksud dengan *how to work within constraint*. Kalau Anda mau melaksanakan *reform*, Anda tunggu dulu semuanya berubah, maka tidak akan terjadi perubahan.”

Teks Dwinanda Ardhi



ANNUAL MEETINGS

2018 | BALI, INDONESIA

INTERNATIONAL MONETARY FUND
WORLD BANK GROUP

Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-WB pada Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Dihadiri oleh 15.000 delegasi dari 189 negara anggota IMF-WB.

Mari manfaatkan peluang ini untuk:

1. Membangun reputasi Indonesia sebagai tuan rumah yang sukses
2. Menunjukkan kemajuan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing global
3. Menciptakan peluang investasi yang luas

Pajak Progresif Tanah yang Tidak Produktif

Teks Suhut Tumpal Sinaga*)

Pemerintah berencana mengenakan pajak progresif atas tanah yang tidak produktif, sehingga tanah yang tidak digunakan akan dikenai pajak lebih tinggi. Alasan Menteri Keuangan menerapkan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Tanah yang menganggur dan hanya dimiliki sebagai alat investasi akan cenderung menghambat aktivitas ekonomi. Salah satu dampaknya adalah kesenjangan

antara orang kaya dan miskin menjadi semakin jomplang. Keberadaan tanah menganggur juga sering kali dimanfaatkan spekulan untuk meraih untung dari kenaikan harga yang tinggi. Niat pemerintah lewat kebijakan ini tentu saja baik. Namun, apakah kebijakan ini akan efektif dan efisien?

Secara teori, instrumen pajak dapat digunakan untuk mengubah perilaku, misalnya perilaku yang cenderung negatif seperti minum minuman yang

mengandung alkohol atau mengonsumsi tembakau. Dalam hal ini, berlaku apa yang sering disebut sebagai pajak dosa. Ada juga pajak yang dikenai atas konsumsi barang dengan *negative externality*, seperti BBM atau ban. *Negative externality* yang dimaksud adalah konsumsi terhadap barang tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku pasif. Sejarah mencatat beberapa negara pernah mengenakan pajak atas *soft drink*, permen karet, pajak jendela,

bahkan pajak atas jenggot. Semuanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku tertentu yang tidak disukai pemerintah pada saat kebijakan tersebut dijalankan.

Menurut teori ilmu ekonomi, setiap pengenaan pajak pada saat transaksi akan menjauhkan kita dari *pareto optimal* (titik optimal pemanfaatan sumber daya). Untuk menjaga mekanisme pasar dapat berjalan sempurna dan efisien, sebaiknya segala biaya—termasuk pajak—pada transaksi harus diminimalkan. Setiap intervensi terhadap mekanisme pasar, termasuk pengenaan pajak akan berdampak pada inefisiensi. Besarnya inefisiensi ini dikenal sebagai *deadweight loss*, yaitu kerugian yang diderita jika dihitung secara total. Oleh karena itu, pengenaan pajak pada saat transaksi harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam mengenakan pajak untuk mengubah perilaku adalah obyeknya harus spesifik, sehingga mudah diidentifikasi. Hal ini sangat penting untuk menghindari bias dalam pengenaan pajaknya. Jangan sampai karena tingkat kesulitan yang tinggi dalam penerapan dan pengawasan, maka terjadi kondisi “besar pasak daripada tiang”. Biaya untuk mengenakan pajak secara efektif ternyata lebih besar dibandingkan hasil yang diperoleh. Jangan sampai niat baik pengenaan pajak progresif justru mempersulit masyarakat penghasilan rendah untuk memiliki rumah.

Spekulasi dan tanah menganggur

Niat seseorang membeli tanah atau bangunan pada dasarnya ada dua, yaitu untuk dipakai dan menjalankan investasi. Jika tanah yang dibeli hendak dipakai, tentu tidak ada masalah. Jika niatnya sebagai investasi, maka seharusnya dibedakan lagi, apakah bersifat spekulatif

atau tidak. Nah, memilah niat spekulatif ini yang sulit. Contoh kasusnya adalah pengusaha properti yang membeli lahan. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses bisnis yang lazim, tetapi mungkin juga semata bertujuan spekulatif. Jamak ditemui pengusaha properti memiliki *land bank* yang besar dan secara faktual dianggurkan. Bahkan ada perusahaan yang tidak pernah melakukan aktivitas bisnis, meskipun menguasai lahan dengan nilai yang signifikan. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan menguasai lahan tersebut untuk nanti dijual kembali. Sebaliknya, seseorang yang membeli rumah dengan maksud untuk dipakai, suatu saat dapat saja menjual tanah itu lagi dengan berbagai alasan. Pembatasan jumlah pembelian pun sulit untuk dikategorikan sebagai tindakan spekulatif. Bisa saja seseorang membeli rumah kedua, ketiga, dan seterusnya untuk dipakai karena pertambahan jumlah anggota keluarga atau pindah domisili anggota keluarga. Lalu apa indikator yang hendak dipakai untuk menggolongkan tindakan ke dalam kategori spekulatif?

Ada tiga kemungkinan indikator yang dapat digunakan, yaitu jumlah kepemilikan atau pembelian, nominal kepemilikan atau pembelian, dan lama penguasaan. Tarif progresif dapat dikenakan atas kepemilikan atau pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya. Tarif progresif juga dapat dikenakan kepada kepemilikan atau pembelian dengan nominal yang lebih besar. Cara lainnya adalah dikenakan atas penguasaan properti yang terlalu singkat. Ketiga opsi ini tidak mudah untuk diterapkan karena harus dikategorikan lagi sesuai dengan karakter masyarakat yang beragam. Pilihan mana pun yang diambil pasti dengan konsekuensi mekanisme pasar menjadi terhambat.

Misalnya, klasifikasi tarif berdasarkan nominal pembelian akan menggeser kurva permintaan dan penawaran. Pembatasan masa penguasaan juga akan menghambat pelaku pasar dalam mengambil keputusan terbaik sesuai kondisi pada masanya masing-masing.

Definisi tentang properti yang menganggur juga perlu diperjelas. Rumah misalnya. Apakah rumah kosong yang hendak disewakan termasuk properti menganggur? Dalam kasus lain, apakah rumah yang hanya ditinggali seorang penjaga termasuk rumah menganggur? Begitu juga dengan definisi lahan kosong. Banyak orang membeli kavling kosong terlebih dahulu dengan maksud akan dibangun lagi setelah mempunyai uang. Di lain sisi, bagaimana dengan lahan kosong yang hanya dipagari dan ditanami singkong? Pada sektor perkebunan dan pertambangan lazim dikenal adanya areal produktif dan areal tidak produktif. Apakah areal tidak produktif ini dapat digolongkan sebagai lahan yang menganggur? Selain itu, ada juga areal emplasemen, areal belum produktif, dan areal lainnya. Apa batasan lahan menganggur? Suatu perusahaan pertambangan bisa saja mendapat izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi atas suatu lahan, tetapi secara faktual tidak terdapat aktivitas hingga bertahun-tahun. Bahkan tidak jarang kemudian menjual hak IUP tersebut kepada pihak lain. Tidakkah ini dapat digolongkan sebagai tindakan spekulatif?

Pajak atas tanah dan bangunan

Bila kita melihat ketentuan pajak atas tanah dan bangunan yang sekarang berlaku, ada beberapa jenis pajak yang mungkin dikenakan, yaitu pajak penghasilan (PPh) final, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),



Ilustrasi
Muhammad
Fithrah

Menurut teori ilmu ekonomi, setiap pengenaan pajak pada saat transaksi akan menjauhkan kita dari pareto optimal (titik optimal pemanfaatan sumber daya).

pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dari keempat jenis pajak tersebut, tidak satu pun pajak yang bersifat progresif. Bahkan secara teori, terutama untuk PPN, dapat bersifat regresif, di mana beban pajak yang ditanggung oleh orang yang berpenghasilan rendah lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh orang yang berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, PPN tidak tepat untuk digunakan.

PPh pada hakikatnya dimaksudkan untuk memajaki penghasilan seseorang. Namun, dalam hal PPh dikenakan pada saat transaksi, sebagaimana PPh final yang sekarang berlaku, secara teori beban PPh dapat digeser oleh penjual kepada pembeli. Elastisitas permintaan dan penawaran akan menentukan *sharing* beban pajak antara penjual dan pembeli, sekaligus juga menentukan efektivitas pajak untuk mengubah perilaku. Jika elastisitas permintaan lebih rendah daripada elastisitas penawaran, maka *sharing* beban pajak pada pembeli akan lebih besar daripada penjual sehingga tidak efektif untuk mengubah perilaku. Kemudian, karena PPh final dikenakan atas nilai bruto, sesungguhnya hal itu sudah melenceng dari hakikat PPh sebagai pajak atas penghasilan. Bahkan pada saat rugi pun dikenakan PPh. Jika hendak dikenakan atas penghasilan netto, kesulitan utamanya adalah administrasi pembuktian nilai penjualan dikurangi nilai pembelian ditambah biaya-biaya lainnya. Administrasi ini akan membebani pemerintah dan wajib pajak sendiri.

BPHTB sejatinya dikenakan pada pembeli, tetapi beban pajaknya juga dapat digeser sebagian kepada penjual tergantung dari elastisitas tadi. Secara administratif, pengenaan BPHTB ini mungkin lebih mudah diterapkan dibandingkan PPh. Misalnya, dengan

meniru pengenaan pajak progresif untuk tanah menganggur seperti pengenaan pajak pada kepemilikan kendaraan bermotor. Tarif lebih tinggi dikenakan pada perolehan hak kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Di samping itu, cara lainnya dapat juga dilakukan dengan mengenakan tarif progresif atas besarnya nilai perolehan hak. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula tarifnya. Kesulitannya adalah kategorisasi nilai jual yang tepat untuk setiap daerah, misalnya kategorisasi di Jakarta tentu tidak sama dengan di pelosok daerah. Semakin banyak kategorisasi, berdasarkan nilai dan wilayah, semakin jauh pula dari efisiensi pasar.

Begitu juga dengan PBB. Pajak ini dapat dikenakan tarif progresif pada kepemilikan kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau mengenakan tarif progresif sesuai kenaikan nilainya. Karena PBB dikenakan bukan pada saat transaksi, pengenaan pajak ini relatif tidak menghambat mekanisme pasar. Keunggulan lainnya adalah pajak progresif PBB lebih mampu mengubah perilaku secara efektif karena beban pajaknya tidak dapat digeser kepada penjual. Pajak progresif pada lahan yang menganggur akan menjadi *sunk cost*, yang secara akuntansi berarti sebagai biaya yang sudah dikeluarkan, tidak dapat dikembalikan, dan secara umum tidak mempengaruhi harga jual. Oleh karena itu, pemilik lahan akan berupaya agar lahan yang dimiliki menjadi produktif daripada dibiarkan menganggur. Namun, mengingat PBB dan BPHTB adalah pajak daerah, tentu diperlukan perubahan yang komprehensif atas seluruh paket undang-undang perpajakan, termasuk pajak daerah. Cara lain yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan membuat kebijakan pajak yang sama sekali baru.

Apapun nama dan bentuk pajak yang akan dikenakan terhadap tanah menganggur, syarat utama agar pajak tersebut efektif dan efisien adalah adanya *database* nasional yang terintegrasi secara *online*. Dengan demikian, pemerintah dapat secara tepat mengenakan tarif progresif dengan opsi indikator pengenaan yang jelas. Pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana merancang kategorisasi dari setiap indikator yang akan digunakan agar efektif untuk mengubah perilaku spekulatif. Jangan sampai terdapat banyak *grey area*, sehingga meningkatkan penghindaran pajak dan memunculkan *abuse of power* dari otoritas pelaksana ketentuan ini di kemudian hari.



*) Dosen PKN STAN dan mahasiswa program S3 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Revaluasi BMN

nilai untuk negeri

Pemerintah melaksanakan penilaian ulang dalam rangka • memperbarui nilai Barang Milik Negara (BMN) dalam laporan keuangan pemerintah pusat • meningkatkan nilai tambah BMN untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara • membangun basis data BMN yang lebih baik • serta mengidentifikasi BMN *Idle*.



www.djkn.kemenkeu.go.id

[ditjenkn](https://www.instagram.com/ditjenkn)

[/DitjenKekayaanNegara](https://www.facebook.com/DitjenKekayaanNegara)

[@DitjenKN](https://twitter.com/DitjenKN)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Call Center
1500 991

Temuan Signifikan untuk Pemberantasan Tuberkulosis

Penemuan Dewi Nur Aisyah dan Tim Garuda 45 membawa kemajuan yang signifikan pada upaya pemberantasan penyakit tuberkulosis (TB). Dewi—biasa dia disapa—bersama timnya berhasil menemukan alat deteksi TB yang mudah dan murah bernama *Tuberculosis Detect and Care* (TB DeCare). Lewat TB DeCare, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu juga sempat melaju menjadi salah satu pemenang tingkat nasional pada kompetisi Imagine Cup Student Competition in World Citizenship Category. Lomba itu digelar oleh perusahaan IT raksasa, Microsoft pada 2016.

Kini Dewi dan tim-nya terus melakukan penyempurnaan TB DeCare sambil berjuang menyelesaikan pendidikan doktoral di University College London (UCL), Inggris. Di kampus, sehari-hari Dewi bergelut dengan bidang Epidemiologi Penyakit Menular. Sebagai mahasiswa di Department of Infectious Disease Informatics, dia bukan hanya belajar penyakit dari sisi epidemiologinya saja, melainkan juga ranah informatika kesehatan.

Perempuan kelahiran 1 Desember 1988 itu tertarik untuk menekuni bidang Epidemiologi karena jumlah ahli yang masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan penduduk Indonesia. Menurut Dewi, di negara-negara maju, ahli Epidemiologi sangat dicari karena keilmuan mereka akan membantu memberikan *evidence based* untuk para pengambil kebijakan di bidang kesehatan.

Dewi mulai mendalami bidang

Epidemiologi sejak duduk di semester lima Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI). Setelah lulus sarjana pada 2010, Dewi melanjutkan program master jurusan Modern Epidemiology di Imperial College London dengan beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Setelah meraih gelar S2 pada 2012, Dewi kembali ke negeri Ratu Elisabeth pada 2014 untuk menjalani program S3. Kali ini dia tak berangkat seorang diri. Suaminya, Rhevy Adriade Putra juga menerima beasiswa S3 dari LPDP. Di London, pasangan suami istri itu bersekolah sambil mengasuh putri kecil mereka, Najwa Falisha Mehvish.

“Saya bersyukur mendapat supervisor yang sangat mumpuni, baik, dan ramah. Teman-teman di UCL juga begitu terbuka dengan perbedaan. Mereka tak memandang aneh orang Asia atau muslimah yang berasal dari lain benua,” kata Dewi dalam wawancara dengan Media Keuangan belum lama ini. Keberadaan Doctoral Training Course di UCL sangat membantunya dalam memahami *software*, metode penelitian, statistik, hingga meningkatkan kemampuan mencari referensi, menulis tesis, dan memberikan presentasi.

Bersekolah sambil mengurus keluarga di luar negeri bukan perkara enteng. Dalam menjalaninya, Dewi memiliki prinsip untuk bekerja cepat. “Jika orang lain membutuhkan waktu enam bulan untuk mengerjakan tugas, maka saya harus dapat menyelesaikannya dalam waktu tiga bulan,” ujarnya. Dalam satu minggu, Dewi mengunjungi kampus dalam

dua hingga empat hari. Ketika di kampus, dia biasa menghabiskan waktu dari jam sembilan pagi hingga delapan malam. “Saya padatkan pekerjaan lima hari menjadi dua hingga tiga hari. Dengan begitu, waktu saya bermain dengan anak, memasak, dan mengurus cucian dapat ditunaikan di sisa hari-hari lainnya,” kata Dewi.

Pengembangan TB DeCare

Dalam pengembangan TB DeCare, Dewi mengajak tiga *awardee* LPDP lain di Inggris dalam Tim Garuda 45. Ketiganya adalah Ahmad Ataka, mahasiswa program doktoral bidang Robotics; Ali Akbar Septiandri, *awardee* yang memiliki keahlian di bidang *Artificial Intelligent*; dan Muhammad Rezqi yang menjalani studi di bidang *Cyber Security and Privacy*. Melalui TB DeCare, mereka mengintegrasikan seluruh komponen yang diperlukan untuk memberantas TB dengan menggunakan teknologi tepat guna dan harga yang terjangkau. “Dengan demikian, teknologi ini dapat dengan mudah diterapkan di negara-negara berkembang di mana permasalahan TB paling banyak ditemukan,” kata Dewi.

Dalam pengoperasiannya, TB DeCare terintegrasi dengan alat pendeteksi otomatis serta menggunakan pengelolaan citra digital (*digital image processing*) dari *sputum* (dahak) pasien. Gambar *sputum* akan menjadi penunjuk adanya bakteri tuberkulosis. Agar terjangkau di daerah-daerah terpencil, Tim Garuda 45 mengembangkan mikroskop *portable* dengan menggunakan ponsel. Melalui alat ini, maka pendeteksian bakteri TB pada *sputum* pasien



Dewi Nur Aisyah terus mengembangkan aplikasi TB DeCare sambil menyelesaikan program doktoral bersama suami dan putri mereka di Inggris.

Foto
Dok. Pribadi



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

tidak lagi memerlukan kinerja evaluasi laboran dan mikroskop di laboratorium, tetapi dapat diterapkan secara otomatis hanya dengan menggunakan ponsel. TB DeCare merepresentasikan alat diagnosis TB yang mudah dan efisien dengan hasil yang akurat.

Menurut Dewi, tantangan pemberantasan TB adalah rendahnya angka kepatuhan berobat pasien yang dapat menyebabkan kejadian putus berobat, bahkan resistensi terhadap obat. Oleh sebab itu, TB DeCare juga terintegrasi dengan portal informasi sekaligus aplikasi pengingat minum obat secara otomatis. Dokter dapat memasukkan jadwal minum obat, jadwal kunjungan, serta jadwal pengambilan obat pasien yang kemudian terhubung dengan sistem pengingat otomatis.

Melalui sistem TB DeCare, dokter atau tenaga kesehatan juga bisa memasukkan data setiap pasien yang telah terdeteksi terinfeksi TB serta mengevaluasi pengobatan pasiennya. Data demografi, gejala, riwayat penyakit, pengobatan, dan evalusi vital pasien akan terekam dalam sistem TB DeCare. Tak hanya itu, pasien dan PMO (Pengawas Minum Obat) juga dapat mengakses informasi mengenai tuberkulosis, jadwal pengobatan, serta forum konsultasi dengan tenaga kesehatan melalui aplikasi *mobile*. “Sistem ini dapat mengadaptasi ketersediaan teknologi di wilayah pengguna, sehingga pengingat minum obat dapat

dikirimkan, baik dalam bentuk aplikasi *mobile* maupun melalui SMS,” ujar Dewi.

Dukungan dari LPDP

Dewi bersyukur karena inovasi Tim Garuda 45 mendapat dukungan dari LPDP. “Tiket perjalanan ke Indonesia untuk mempresentasikan karya kami saat kompetisi Imagine Cup ditanggung oleh LPDP,” katanya. Di samping itu, LPDP juga menghubungkan mereka dengan pihak-pihak terkait yang dapat mendukung pengembangan TB DeCare hingga nantinya bisa diterapkan di Indonesia.

“Atas izin Allah, enam bulan setelah TB DeCare menang di Imagine Cup, saya bertemu dengan Pak Arifin Panigoro selaku Ketua dari STOP TB Partnership Indonesia. Beliau sangat antusias dengan ide kami dan bersedia menjadi sponsor untuk pengembangan alat ini,” ujar Dewi. Pada awal Februari lalu, Tim Garuda 45 memberikan paparan di hadapan berbagai pihak, antara lain pejabat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, kepala puskesmas, kepala Laboratorium Mikrobiologi UI, ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia, dan perwakilan Microsoft Indonesia.

Dewi dan Tim Garuda 45 telah memiliki rencana pengembangan TB DeCare yang meliputi penambahan fungsi *bright field* dan *fluorescence* dalam satu mikroskop, pewarnaan sampel *sputum* dengan

staining Ziehl Nielsen dan Auramine, serta perbandingan akurasi dan kemudahan antara perbesaran mikroskop menggunakan *ball lense* dengan *double lense*. Di samping itu, mereka juga memiliki rencana untuk mengembangkan mikroskop yang dilengkapi dengan penggeser preparat otomatis. Dengan demikian, laboran hanya perlu meletakkan sampel pada preparat dan mikroskop dapat bekerja otomatis dalam menangkap gambar serta mengirimkannya kepada server untuk dianalisa. “Kami juga ingin mengembangkan sumber energi mikroskop berupa baterai jam atau *charger*,” ujar Dewi.

Di masa depan, Dewi bercita-cita untuk menjadi akademisi dan peneliti internasional. “Saya sangat berharap bidang keilmuan yang tengah saya pelajari saat ini sedikit banyak akan dapat memberikan sumbangsih perubahan kepada Indonesia,” kata perempuan yang baru saja menerbitkan buku berjudul “Awe-Inspiring ME!” tersebut. Dewi juga berharap dapat menjadikan masa studi S3 yang dijalaninya dalam tiga tahun sebagai periode untuk menyerap ilmu seluas-luasnya. “Hingga ilmu itu kemudian saya tularkan kepada generasi bangsa selanjutnya,” ujar Dewi mengakhiri wawancara.

Teks Dwinanda Ardhi

Sinergi Pusat dan Daerah: Pinjaman Tanpa Bunga Untuk Infrastruktur

Teks Agus Kristanto, Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



Saat ini pemerintah tengah membangun infrastruktur dalam skala besar. Contohnya, penancangan tol laut yang diikuti pembangunan pelabuhan, jalur rel kereta api di Sulawesi dan Papua, serta tol Trans Sumatera. Dari aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur mutlak dilakukan, termasuk oleh pemerintah daerah. Bagi pemerintah pusat, alternatif sumber pendanaan infrastruktur cukup banyak. Selain dari pendapatan sendiri, bisa juga dari penjualan obligasi atau utang luar negeri. Pada mayoritas daerah, sumber pendanaan pembangunan dapat dikatakan melulu dari sisa pendapatan setelah dikurangi belanja

operasional. Untuk itu, daerah harus diberi kemudahan akses akan sumber pendanaan. Pinjaman tanpa bunga dari pemerintah pusat sangat layak dipertimbangkan. Bagi pemerintah pusat dengan skala APBN lebih dari Rp2.000 triliun, nilai tiap proyek infrastruktur relatif kecil, meski secara keseluruhan sangat besar, mencapai ratusan triliun. Sementara, bagi sebagian besar daerah, satu proyek

infrastruktur dengan nilai seratus miliar saja tidak mudah untuk didanai. Sumber dana APBD sangat terbatas. Kepala daerah bisa frustrasi akibat kelangkaan dana untuk membangun infrastruktur. Sebagian mencoba mencari alternatif dari luar APBD. Walikota Bandung mencari hibah hingga ke Belanda. Bupati Bantaeng menggunakan koneksi Jepang untuk mendapat hibah. Gubernur DKI Jakarta kreatif memberdayakan kalangan pengusaha. Sayangnya bantuan-bantuan tersebut nilainya kecil-kecil, tidak memadai untuk infrastruktur yang butuh dana besar.

Skema Mass Rapid Transport (MRT) DKI

Tahun 2012, pada awal Joko Widodo menjabat gubernur DKI, beliau langsung bertemu dengan Menko Perkonomian dalam rangka menuntaskan skema pembiayaan MRT. Pemerintah pusat kemudian menyetujui skema pembiayaan yang memberi manfaat lebih kepada DKI dibanding skema sebelumnya. Semula, dengan pinjaman dari Jepang sebesar 125 miliar yen, sebanyak 58 persen akan ditanggung Pemprov DKI dan 42 persen ditanggung oleh pemerintah pusat. Bunganya sebesar 0,25 persen dengan masa pengembalian 30 tahun. Namun, akhirnya ditetapkan pinjaman tersebut akan ditanggung Pemprov DKI sebanyak 51 persen dan dan pemerintah pusat 49 persen. Bunganya 0,1 persen dengan waktu pengembalian 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun. Pemberi pinjaman juga memberi keringanan dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman dan nyaris tanpa bunga. Kecil kemungkinan skema pembiayaan yang diperoleh DKI tersebut akan terulang lagi untuk daerah lain. Dengan kondisi penerimaan negara yang tersendat, sulit bagi pemerintah

pusat memberi hibah serupa. Daerah dituntut kreatif memanfaatkan sumber pembiayaan pembangunan dari sumber yang terbatas. Gubernur Jateng sempat melontarkan wacana penerbitan obligasi Rp1 triliun. Namun, pembiayaan dengan obligasi akan menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur menjadi mahal. Jika obligasi pemerintah pusat memberi imbal hasil hampir 8 persen, maka daerah harus memberi penawaran lebih tinggi untuk menarik peminat. Pada akhirnya, biaya yang ditanggung bisa mencapai lebih dari 10 persen, terdiri dari kupon yang lebih besar dari 8 persen dan ditambah biaya-biaya lain. **Cashback pajak** Skema pinjaman tanpa bunga dari pusat ke daerah dalam rangka pembiayaan infrastruktur akan menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai pemberi pinjaman, pemerintah pusat mendapat pajak dari pelaksanaan proyek. Sebagai penerima utang, pemerintah daerah dapat membangun daerah dengan dana murah. Belanja pemerintah daerah juga membantu penerimaan PPN sebesar 10 persen dan PPh badan 2,5 persen dari rekanan pelaksana proyek. Dengan pembiayaan yang sebagian bersumber dana daerah sendiri (20 persen misalnya), maka dana tunai yang disalurkan pusat hanya sekitar 67,5 persen dari nilai proyek. Pokok pinjaman 80 persen, sebagian akan kembali dalam bentuk pajak. Perhitungan sederhana akan menghasilkan *cashback* dalam bentuk setoran pajak sebanyak 15 persen dari pinjaman yang diberikan. Selain dengan dana APBN, pemerintah pusat juga memberdayakan BUMN. Biasanya, BUMN sektor riil seperti kontruksi bertindak sebagai pelaksana

pembangunan, didukung pendanaan dari BUMN perbankan plus kucuran setoran modal dari pemerintah. Proyek infrastruktur BUMN merupakan investasi yang dikalkulasi secara komersial. Nilai investasi pembangunan jalan tol akan diperhitungkan dalam penentuan tarif tol. Sementara, belanja pembangunan infrastruktur daerah adalah bagian dari pelayanan umum sehingga tidak ada pendapatan yang masuk ke APBD secara langsung. Jika pembangunan infrastruktur dibiayai dengan pinjaman berbunga tinggi, akan terlalu berat beban yang harus ditanggung dalam APBD. Jika pemerintah bisa memberi Penanaman Modal Negara (PMN) ke BUMN untuk mendukung pembangunan insfrastruktur, pinjaman tanpa bunga untuk infrastruktur daerah juga layak dipertimbangkan. Pinjaman yang diberikan sebaiknya tidak 100 persen. Dengan asumsi bahwa pinjaman harus dilunasi sampai berakhirnya periode kepala daerah, porsi 80 persen dari nilai proyek merupakan angka yang moderat. Anggaplah proyek mulai dilaksanakan pada tahun ke-2 sang kepala daerah menjabat. Maka pada tahun bersangkutan akan ada alokasi 20 persen pada APBD untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur dimaksud memang menjadi prioritas. Selanjutnya jika proyek selesai dikerjakan, porsi 20 persen tersebut tetap akan dialokasikan pada APBD tahun-tahun berikutnya. Alokasi dimaksud dalam rangka pelunasan utang kepada pemerintah pusat. Dengan skema tersebut, utang lunas dalam waktu 4 tahun. Skema yang sama bisa dimanfaatkan oleh kepala daerah berikutnya.

Ditjen Pajak Bisa Akses Langsung Rekening Nasabah Perbankan

Riviu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/ 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional



Berdasarkan data dari McKinsey, terdapat sekitar Rp3.600-Rp4.000 triliun harta WNI yang mengendap di luar negeri. Namun demikian, Pemerintah belum bisa mengakses data tersebut secara maksimal karena adanya perkembangan mekanisme pertukaran informasi serta jenis-jenis data dan informasi yang dipertukarkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia sebagai anggota G20 telah tergabung dalam komitmen otomatisasi keterbukaan informasi. Salah satu kesepakatan G20 adalah diperolehnya

informasi perbankan dan transaksi yang dilakukan warga negara di luar negeri. Dalam pertemuan G-20 di Jerman 17-18 Maret lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Indonesia sepakat untuk bertukar data informasi perpajakan secara otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOI*) dan prinsip penghindaran pajak pada September 2017 atau paling lambat September tahun depan. Saat ini, terdapat 54 negara yang akan menjalankan AEOI di tahun 2017 dan 46 negara lainnya, termasuk Indonesia, akan menerapkan AEOI di tahun 2018. Sebagai dasar pertukaran informasi, Menkeu telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional pada 3 Maret 2017. PMK

Ilustrasi
Arfindo Briyan

tersebut diterbitkan untuk menggantikan PMK Nomor 125/PMK.010/2015 dan PMK Nomor 60/PMK.03/2014, serta untuk menyokong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Jenis Pertukaran Informasi

Perjanjian dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2017 adalah perjanjian bilateral atau multilateral yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengikatkan dirinya dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra yang mengatur pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Perjanjian dimaksud meliputi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan, Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan, Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral, Persetujuan antar Pemerintah, atau perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

Pertukaran informasi tersebut bertujuan mencegah penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyalahgunaan P3B, dan/atau mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Pertukaran informasi dapat bersifat resiprokal antara pejabat yang berwenang. Pertukaran informasi meliputi bisa berdasarkan permintaan negara asal wajib pajak, pertukaran secara spontan, dan/atau pertukaran secara otomatis.

Pertukaran informasi berdasarkan permintaan dapat dilaksanakan apabila wajib pajak diduga melakukan transaksi penghindaran pajak, pengelakan pajak, terindikasi memperoleh manfaat P3B,

atau belum melakukan kewajiban pajak. Pertukaran secara spontan dilakukan bila terdapat temuan dari hasil pemeriksaan, penyidikan, keberatan, dan penelitian atas satu wajib pajak dari negara lain. Otoritas pajak negara yang menemukan hal tersebut memiliki kewajiban mengirim datanya ke negara yang bersangkutan tanpa diminta.

Begitu pula apabila Indonesia menemukan transaksi mencurigakan atas warga negara asing (WNA) yang dilakukan di Indonesia, maka Indonesia wajib mengirim datanya ke negara asal wajib pajak. Informasi yang diberikan harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain adanya indikasi hilangnya potensi pajak yang signifikan, pengurangan atau pembebasan pajak yang dapat menambah kewajiban pajak di negara mitra, kegiatan yang mengurangi kewajiban perpajakan ataupun akibat *transfer pricing*.

Terakhir, pertukaran informasi keuangan secara otomatis dilakukan tanpa menunggu adanya temuan-temuan terkait penyelidikan dan dilakukan pada waktu tertentu secara periodik, sistemis, dan berkesinambungan. Informasi nantinya dipertukarkan secara otomatis begitu tercatat dalam administrasi otoritas pajak suatu negara.

Potensi Pajak Signifikan, Diperiksa

Dalam melaksanakan pertukaran informasi, pejabat berwenang dapat melakukan pertemuan antar pihak berwenang, pemeriksaan pajak luar negeri, dan pemeriksaan pajak secara simultan. Pertemuan dilaksanakan berdasarkan usulan pejabat yang berwenang untuk membahas hal-hal terkait pertukaran informasi. Adapun pemeriksaan pajak luar negeri dilakukan untuk menindaklanjuti

pertukaran informasi berdasarkan permintaan. Sebagai tindak lanjutnya, dapat dilakukan pemeriksaan pajak simultan bila terdapat kepentingan bersama dengan negara mitra.

Pertukaran Data Perbankan dan Jasa Keuangan

PMK Nomor 39/PMK.03/2017 juga mengatur informasi keuangan nasabah asing yang berasal dari bank, pasar modal atau efek, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya. Informasi yang dipertukarkan berisi identitas nasabah, identitas LJK tempat nasabah terdaftar, dan nomor rekening atau nomor lain dengan fungsi yang setara. Hal baru lainnya yaitu LJK wajib menyampaikan laporan informasi nasabah asing kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Otoritas Jasa Keuangan.

Penutup

Sebagai tindak lanjut pertemuan G20 tersebut, Indonesia harus merevisi Undang-Undang perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan pajak yang belum memberikan akses informasi ke DJP secara luas. Pemerintah juga akan merevisi Undang-Undang perpajakan yang mengatur kewenangan petugas pajak dalam membuka data perbankan wajib pajak domestik. Sebagai langkah awal, Perpu yang ditargetkan pada April 2017 akan fokus pada data perbankan yang dimiliki oleh WNA. Perppu ini akan membantu negara mitra agar bisa memperoleh izin pembukaan data perbankan wajib pajaknya yang ada di Indonesia.

Teks Budi Sulistyono

Dedikasi Melalui Aplikasi

Lebih dari sepuluh tahun silam, Erick masih memegang ijazah dengan nilai D pada mata kuliah Pengantar Komputer. Kini, puluhan aplikasi telah diciptakannya, karyanya pun telah mendapat apresiasi dari para *programmer* internasional.

Pria muda berkaca mata itu tengah bersemangat menunjukkan aplikasi DMFAS di layar komputer jinjing. Jemarinya terlihat terampil meloncat dari satu menu ke menu lain. Tak heran, aplikasi itulah yang telah menjadi fokus perhatiannya dalam enam tahun terakhir. Erick Harmawan sengaja dikirim langsung ke Geneva, Switzerland untuk berkenalan dan mempelajari seluk beluk DMFAS. Pulang dari Swiss, ia sukses mengembangkan DMFAS sesuai dengan kebutuhan pengelolaan utang Indonesia. DMFAS (*Debt Management and Financial Analysis System*) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) yang digunakan dalam pengelolaan utang suatu negara atau organisasi. DMFAS ini pertama kali digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun 1989 dengan tujuan untuk mengadministrasikan pinjaman pemerintah. DMFAS beberapa kali mengalami *update* yaitu pada tahun 2000, 2005, dan 2011.

Belajar otodidak

Keahlian Erick dalam mengotak-atik perangkat lunak komputer bisa dikatakan suatu pencapaian. Ya, ayah dua putri ini tak pernah memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi. Semua ia

raih dengan belajar secara otodidak. “Nilai mata kuliah Pengantar Komputer di ijazah saya bahkan dapat nilai D,” ujar lulusan Prodi Kebendaharaan Negara STAN tahun 2004 ini sembari tertawa.

Sejak tahun 2005, Erick bertugas di Subdirektorat Administrasi Pinjaman dan Hibah Luar Negari, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Pada tahun 2007, beberapa tugas dan fungsi DJPB berpindah ke unit eselon I baru, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). Erick pun termasuk menjadi salah satu pegawai pertama saat awal berdirinya DJPU. Kala itu ia ditempatkan di Seksi Pengelolaan Basis Data yang hampir sebagian besar pekerjaannya bersinggungan dengan teknologi informasi.

Lambat laun, Erick menikmati proses perkenalannya dengan teknologi informasi. Terlebih saat atasannya meminta pria kelahiran Pati, 22 November 1982 ini untuk membuat suatu aplikasi. Bukan suatu proses yang singkat dan mudah. Namun Erick bertekad untuk bisa menaklukkan bahasa pemrograman komputer yang menjadi momok sebagian orang. Bahkan *e-document* adalah aplikasi yang pertama dibuatnya pada tahun 2008. “Saya merasa puas saat aplikasi pertama ini bisa membantu pekerjaan teman-teman,” katanya. Aplikasi dengan bahasa pemrograman VB.NET tersebut mendapat

feedback positif dari para rekan kerjanya. Hingga saat ini, Erick telah membuat dan mengembangkan 20 aplikasi. Beberapa diantaranya yaitu aplikasi Alat Kontrol Pembayaran (2008), *Loan Management System* (2009), *Dashboard Utang Pemerintah* (2009), *DMFAS Interface* (2012), *Mirroring Database DMFAS* (2015), Monitoring Surat Berharga Negara (2016), Integrasi DMFAS dengan SPAN (2016), Aplikasi *Assessment Center* (2017), dan sebagainya.

Menimba ilmu ke Geneva

Pada tahun 2011, Erick mendapat kesempatan training mengkonversi DMFAS 5.3 ke DMFAS 6 yang dilaksanakan di kantor pusat DMFAS di Geneva, Switzerland. Seusai pelatihan, Erick berupaya menerapkan DMFAS versi 6 agar selaras dengan kebutuhan pengelolaan utang pemerintah Indonesia. Dalam praktiknya, DMFAS versi 6 bisa mengakomodasi pengelolaan pinjaman dan hibah negara, namun tidak untuk surat berharga negara. Untuk memenuhi kebutuhan DJPPR terhadap perekaman surat berharga negara, Erick pun mengembangkan DMFAS Interface.

Tak mudah bagi Erick untuk menjembatani kebutuhan DJPPR dengan fitur yang telah disediakan oleh DMFAS. Selama enam bulan, Erick mengembangkan

aplikasi yang telah digunakan di sekitar 58 negara tersebut dan melakukan *join development* bersama para *programmer* negara lain. Pernah juga *programmer* DMFAS dari Geneva mengunjungi DJPPR untuk memantau DMFAS *Interface* yang tengah dikembangkan Erick. Kemudian, pada tahun 2012, ia kembali mengunjungi kantor pusat DMFAS di Geneva untuk melakukan validasi DMFAS *Interface*. “Mereka (*programmer* DMFAS di Geneva) sangat mengapresiasi pemerintah Indonesia karena mampu mengembangkan DMFAS,” ujar pria berkaca mata ini sembari tersenyum. Pada tahun 2013, Erick mendapat kesempatan kembali lagi ke Geneva untuk mengikuti Advanced User Training DMFAS 6. Erick tak pernah merasa puas atas pencapaiannya. Lulusan SMA 1 Temanggung ini selalu memperkaya dirinya dengan berbagai informasi terkini mengenai teknologi informasi. “Teknologi informasi berkembang sangat cepat. Kalau malas belajar dan malas meng-*update* informasi, kita akan jauh ketinggalan,” tegas pria yang berdomisili di Pondok Gede, Jakarta Timur ini.

Role model

Hidup di zaman serba cepat dengan teknologi mumpuni, teknologi terbukti mampu membuat kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Layaknya nyala lilin kecil yang menerangi sekitarnya, Erick pun berkontribusi mempermudah dan mempercepat kinerja organisasi. Erick mengakui, ia sangat terinspirasi dengan semangat kerja Emil, Kepala Bagian Teknologi Informasi Sekretariat DJPPR. Emil merupakan sosok yang mendukung penerapan DMFAS sejak tahun 1989 hingga kini telah dikembangkan menjadi DMFAS *Interface*.

Erick juga mengapresiasi kebijaksanaan Emil dalam menggunakan anggaran. “Pak Emil tidak suka jika anggaran digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, seperti konsinyering atau rapat dalam kantor yang berlebihan,” ujarnya. Di sisi lain, Emil merupakan sosok pimpinan yang sangat memperhatikan ibadah para staf yang beragama muslim. “Bila adzan sudah berkumandang, pak Emil akan terus menunggu staf laki-laki yang tidak pergi ke masjid agar segera pergi,” ujarnya sembari tertawa.

Selama 12 tahun mengabdikan, Erick bercita-cita melanjutkan studi ke jenjang S2 di bidang teknologi informasi. Dengan berbagai pengalaman di bidang teknologi informasi dan keikutsertaan secara aktif dalam komunitas para *programmer* internasional, Erick ingin lebih berkontribusi bagi DJPPR. “Saya ingin menerapkan IT-Based secara menyeluruh di DJPPR. Teknologi informasi akan meningkatkan kualitas informasi sebagai dasar perumusan strategi pengelolaan utang,” tegasnya.

Teks Pradany Hayyu



Erick saat mengikuti training DMFAS di Geneva, Switzerland.

Foto
Dok. Pribadi

Melatih Hati

Foto
look.tm

Banyak di antara kita yang mengetahui pepatah populer ini, *memberilah lebih maka kamu akan menerima lebih*. Namun, pada kenyataannya bukankah kita masih sering lupa? Tentu jika dalam hitungan matematika, berapapun gaji kita, jika kita sisihkan 2.5 persennya untuk orang lain, jumlahnya akan berkurang. Namun demikian, dalam urusan memberi tentu saja kehidupan kita bukanlah angka hitungan matematika. Kita mengenal bahwa tidak ada energi yang akan musnah. Termasuk energi memberi.

Kute Blackson, seorang motivator dan penulis dunia, menyatakan bahwa ketika kita memberi kepada seseorang, maka kita tidak selalu menerima kembali pemberian dari seseorang yang kita pikir seharusnya mengembalikan. Namun,

percayalah, apa yang kita keluarkan kelak pasti akan kembali. Hal ini selaras dengan teori energi. *The energy you put out will always recirculate and find its perfect way back to you*. Ya, energi yang kita keluarkan akan selalu berputar dan menemukan jalan sempurna untuk kembali pada kita.

Lalu, setelah mengetahui itu semua, mengapa memberi terasa begitu sulit? Kiranya terdapat dua kemungkinan. Pertama, karena kurangnya rasa percaya. Kedua, karena kurangnya keberanian.

Kita kurang percaya bahwa saat memberi, rejeki kita sejatinya bukannya berkurang melainkan bertambah. Kita kurang berani, sebab kita menganggap memberi bermakna mengurangi. Oleh karenanya, kita tidak mau mengambil risiko untuk mengurangi apa yang kita miliki.

Padahal, seperti halnya otot dalam tubuh, hati kita pun sepatutnya dilatih. Hati yang tidak pernah dilatih untuk memberi tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya memberi. Sebaliknya, semakin sering kita melatih hati untuk memberi, maka kenikmatan dalam memberi semakin bisa dirasakan oleh hati.

Maka, tunggu apalagi? Sekecil apapun pemberian adalah kebaikan. Setiap kebaikan pasti akan kembali melalui banyak jalan. Maka mulai sekarang, jangan pernah ragu untuk melatih hati kita agar bisa merasakan nikmatnya memberi.

Teks Athiah Listiyowati

Beauty and the Beast: Menghidupkan Kembali Kisah tentang Cinta Sejati

Foto
leonardmaltin.com

Dongeng tentang si Cantik dan si Buruk Rupa pertama kali ditelurkan Disney dalam sebuah film animasi pada tahun 1991. “Beauty and the Beast”, kala itu, sukses merajai *box-office* sekaligus meraih berbagai penghargaan—termasuk mencatatkan sejarah sebagai film animasi pertama yang mendapatkan nominasi dalam kategori *Best Picture* di ajang *Academy Awards* tahun 1992. Tak hanya itu, tembang “Beauty and the Beast” yang dinyanyikan oleh Celine Dion dan Peabo Bryson saat itupun menjadi legenda dan selalu terngiang hingga kini.

Seolah ingin mengulang kesuksesan tersebut, Disney menunjuk sutradara Bill

Condon untuk menghidupkan kembali “Beauty and the Beast” dalam format *live-action*. Dengan menggaet Emma Watson—yang tenar berkat seri Harry Potter—sebagai Belle (alias si Cantik) dan Dan Stevens sebagai Sang Pangeran (alias si Buruk Rupa), “Beauty and the Beast” berhasil tampil manis dan memikat.

Dari segi cerita, tak banyak yang berubah. “Beauty and the Beast” masih tentang Sang Pangeran yang dikutuk menjadi makhluk buruk rupa, yang berusaha menemukan cinta sejatinya agar terlepas dari kutukan tersebut. Di tengah keputusasaannya, datanglah Belle ke istananya untuk menyelamatkan ayahnya, Maurice (diperankan oleh Kevin Kline),

yang ditahan Sang Pangeran karena mencuri mawar di istana. Siapa sangka, berkat pertemuan ini hubungan pun terjalin di antara Belle dan Sang Pangeran.

Emma Watson dan Dan Stevens adalah aktris dan aktor yang, menurut saya, sangat tepat memerankan kedua tokoh utama dalam film ini; seolah mereka ditakdirkan untuk sungguh-sungguh menjadi si Cantik dan Sang Pangeran. *Chemistry* di antara keduanya memberikan dinamika yang penting dalam pengembangan karakterisasi Belle dan Sang Pangeran—bahwa Pangeran, yang berwujud makhluk buruk rupa nan lalim dan murung, perlahan luluh dan membuka diri pada Belle. Pun sebaliknya.

Terlepas dari haru-biru romantisme antara Belle dan Sang Pangeran, “Beauty and the Beast” tetap tampil meriah. Melalui olah komputer, benda-benda seperti jam, tempat lilin, teko, cangkir, lemari pakaian, bahkan piano bertingkah dan berbicara layaknya manusia (karena mereka adalah jelmaan pelayan istana). Begitu unik dan memberikan semarak terutama dalam adegan-adegan musikal yang ceria. “Beauty and the Beast”, pada akhirnya, menjadi suguhan yang tak sekadar dramatis, tetapi juga menyenangkan. “*Tale as old as time...*”

Teks Akbar Saputra

Pura Taman Ayun, Sebuah Warisan Budaya Dunia

Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika merencanakan liburan ke Pulau Bali? Berjemur di pantai menunggu surya tenggelam? Menghabiskan malam dengan berjalan-jalan di kawasan Legian? Atau menikmati nyamannya suasana pedesaan Ubud? Mungkin tulisan berikut dapat menjadi pilihan yang akan mengubah daftar tujuan Anda di pulau Dewata ini nanti.

Pulau Maui di Hawaii, Santorini Cyclades, dan Providenciales di Turki mungkin telah menyalip Bali sebagai pulau terindah di dunia versi Trip Advisor. Bali sendiri walaupun masih merajai pulau terbaik regional Asia, namun berada di posisi ke lima sebagai pulau terindah di dunia.

Maui, Santorini, dan Providenciales memiliki pantai yang sangat indah sebagai daya tarik utama wisata mereka. Bali sebenarnya punya kesempatan besar merebut kembali predikat pulau terindah nomor satu dunia. Syaratnya adalah bisa mengawinkan wisata alam yang memesona dengan kekayaan budaya yang unik dan terjaga kelestariannya.

Tahun 2012, pada sidang tahunannya yang ke-36, UNESCO

menobatkan sebuah Pura di Bali sebagai salah satu warisan budaya dunia. Pura tersebut bernama Taman Ayun, sebuah taman sekaligus tempat ibadah yang dibangun pada masa kejayaan kerajaan Mengwi. Letaknya yang berada di perlintasan jalur antara Ubud, Denpasar, dan Singaraja, menjadikan Taman Ayun destinasi wisata budaya berlokasi paling strategis di Bali.

Kompleks taman yang dikelilingi kolam air ini dikunjungi tak kurang dari 1.300 wisatawan luar negeri tiap harinya. Penataan yang baik, kebersihan yang terjaga, ditunjang dengan lokasi yang strategis, membuat tempat suci ini banyak mencuri hati siapa saja yang mengunjunginya.

Untuk menikmati keindahan Pura Taman Ayun, wisatawan domestik cukup membeli tiket masuk seharga Rp10.000. Di pelataran Pura, Anda akan disuguhkan hamparan rumput hijau yang terawat baik. Tak jarang, pengunjung duduk-duduk santai di area ini untuk bercengkerama sembari mengabadikan momen-momen kebersamaan mereka.

Melangkah lebih jauh lagi, terdapat paviliun yang menampilkan minatur permainan sabung ayam di Bali. Sabung ayam mungkin dianggap tabu di wilayah lain, namun merupakan sebuah tradisi yang dekat dengan kehidupan masyarakat Bali. Di samping

kiri kompleks taman, terdapat patung barongan, makhluk mitologi Bali yang menyerupai singa. Patung seni ini seringkali berhasil ‘mengajak’ wisatawan untuk berfoto. Patung barongan diletakkan di sebuah bangunan kecil berarsitektur Bali bersama dengan lukisan-lukisan hasil karya seniman setempat.

Di dalam kompleks Pura Taman Ayun, terdapat bangunan suci yang disebut ‘Meru’ dengan atap bertingkat tiga, lima, tujuh, dan sebelas. Sebagai bangunan inti, Meru memiliki dua makna. Pertama, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru yang melambangkan alam semesta. Kedua, Meru juga melambangkan purusa dan pradana atau bapak dan ibu. Atap Meru sendiri dibuat dari bahan ijuk yang disusun rapi.

Taman Ayun adalah lokasi wisata budaya yang sayang untuk dilewatkan. Bersama dengan banyak lokasi wisata budaya lain seperti Tirta Empul di Tampaksiring, Taman Sukasada di Karangasem ataupun Pura Ulun Danu di Bedugul, para peresensi wisata seyogianya berpikir ulang untuk kemudian menjadikan Bali sebagai pulau paling indah nomor satu di dunia di tahun-tahun selanjutnya.

Teks Yogi Bayu Avian,
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak



Menyatukan Alunan Musik dan Aliran Ilmu



Alunan musik dipercaya memiliki kemampuan untuk menggerakkan tubuh manusia. Misalnya saja, secara sederhana ia mampu mempengaruhi cepat atau lambatnya detak jantung. Alasan sederhana itu cukup membuat salah satu insan musik Indonesia, Leilani Hermiasih atau Lani, yang juga dikenal dengan nama Frau, merasa jatuh cinta sejak kecil terhadap musik. Tidak hanya itu, dengan prinsip tersebut Lani mempunyai motivasi yang besar untuk mempelajari musik tanpa memandang jenis musiknya. Menurutnya, setiap jenis musik memiliki warnanya sendiri yang memberikan keindahan.

Terinspirasi dari sosok *songwriter* sekaligus *pianist* internasional, Regina Spektor, Lani tumbuh menjadi seorang pianis klasik yang handal. Bakat musik juga tumbuh dari bakat ayahnya yang ahli bermain alat musik gamelan. Sementara itu, ibunya juga memiliki minat yang besar dalam melestarikan musik tradisional. Dengan latar belakang keluarga yang mencintai musik, Lani pun sudah diperkenalkan dengan berbagai instrumen

musik sedari kecil. Ketika masuk Sekolah Menengah Atas, ia mulai belajar untuk menulis tangga lagu dengan menggunakan instrumen gitar dan piano.

Musik juga berhasil mengantarkan Lani lulus dalam salah satu beasiswa bergengsi nasional, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia berharap dengan pendidikan yang diambarnya, ia bisa mengembangkan seni musik di Indonesia. Ia mengambil program Master in Social Anthropology (Ethnomusicology strand) di Queen's University Belfast, Irlandia Utara, Inggris. Di sana, ia fokus mempelajari antropologi emosi dalam bidang seni. Di universitas tersebut juga, ia belajar dari salah satu peneliti yang menjadi idamannya sejak lama untuk menimba ilmu musik.

Ia memiliki visi untuk menyelaraskan gagasan-gagasan dari generasi muda agar mampu memberikan kontribusi ke negara. Menurutnya, generasi muda saat ini seringkali tampak menjadi kaum milenial yang apatis dan serba takut berkomitmen, termasuk berkomitmen pada negerinya. "Saya pikir ini adalah kesempatan emas,

terutama bagi saya yang selama ini bekerja 'serabutan' sebagai seniman merangkap penggagas lembaga kajian independen. Saya pikir pada awalnya, saya tidak akan diterima karena bidang kajian saya bukan termasuk yang diprioritaskan. Namun, saya bersyukur. Ternyata, musik mengantarkan saya untuk diterima. Sejak itu, komitmen saya berkontribusi pada negeri semakin tinggi," ceritanya.

Untuk menyatukan *passion* dengan jenjang pendidikannya, sekembalinya dari Belfast, ia ingin untuk terus menyalurkan energi musiknya dengan membentuk lembaga kajian musik yang ia beri nama LARAS (*Studies of Music in Society*). Lembaga ini bisa diakses melalui alamat www.laras.or.id. Dengan menyatukan kedua hal tersebut dalam satu ruang, dalam jangka panjang ia berharap dapat menjalankan program-program pemberdayaan lainnya dengan musik sebagai sarana utamanya.

Teks Abdul Aziz



Nama	: MAS PRAIM
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Sifat	: Visioner, <i>simple, on time</i> , berintegritas, pintar, dan teliti
Fisik	: Tinggi, kumis dan berewok tipis, kacamata bulat kekinian, berpakaian seragam biru

MEMPERINGATI HARI PENERBANGAN NASIONAL

9 APRIL 2017



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA